



LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 067

TAHUN 2018 AUDITED



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

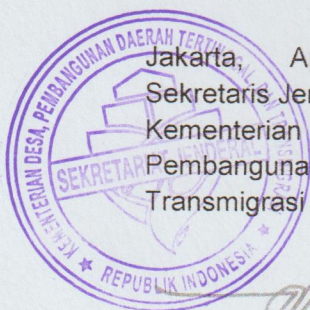
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di samping itu, Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, April 2019
Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	76
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	90
F. Pengungkapan Penting Lainnya	95
Lampiran dan Daftar	133



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2019

Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Republik Indonesia,



Eko Putro Sandjojo

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 *Audited* telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Realisasi Pendapatan Negara 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp40.622.051.346,00. Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.460.676.358.438,00 atau mencapai 93% dari alokasi anggaran sebesar Rp5.888.602.212.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.915.708.390.794,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp581.833.398.323,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.225.542.132.484,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp19.541.286,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.108.313.318.701,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp4.374.143.149,00; dan Rp2.911.334.247.645,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.300.549.997,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.247.755.352.447,00 sehingga terdapat Defisit dari

Kegiatan Operasional senilai Rp5.242.454.802.450,00. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp673.795.896.287,00 dan Rp5.916.250.698.737,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.916.250.698.737,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp3.434.655.232.448,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp5.916.250.698.737,00, ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp(20.399.194.336,00) dan transaksi antar entitas senilai total Rp5.413.328.908.270,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp2.911.334.247.645,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI****LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018		% Thd Angg	31 Desember 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	519.950.000	40.622.051.346	7812,68	20.305.076.219
PENDAPATAN		519.950.000	40.622.051.346	7812,68	20.305.076.219
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	283.815.842.000	214.433.233.366	75,55	208.337.577.246
Belanja Barang	B.2.2	5.322.307.401.000	4.972.694.878.931	93,43	3.781.100.564.852
Belanja Modal	B.2.3	282.478.969.000	273.548.246.141	96,84	192.910.628.456
JUMLAH BELANJA		5.888.602.212.000	5.460.676.358.438	92,73	4.182.348.770.554

II. NERACA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	16.831.000	18.938.471
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	1.182.986
Piutang Bukan Pajak	C.3	14.895.514	964.895.514
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan pajak	C.4	(74.477)	(4.824.477)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	14.821.037	960.071.037
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.6	88.468.100	88.468.100
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	(442.338)	(442.338)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.8	88.025.762	88.025.762
Persediaan	C.9	581.713.720.524	399.770.817.759
Jumlah Aset Lancar		581.833.398.323	400.839.036.015
ASET TETAP			
Tanah	C.10	122.404.255.697	120.992.735.697
Peralatan dan Mesin	C.11	344.347.161.374	331.245.725.328
Gedung dan Bangunan	C.12	329.194.678.847	330.387.908.090
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	732.005.217.423	965.108.724.575
Aset Tetap Lainnya	C.14	159.755.240.972	212.537.171.053
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.15	11.181.884.170	24.495.714.219
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.16	(473.346.305.999)	(486.410.461.843)
Jumlah Aset Tetap		1.225.542.132.484	1.498.357.517.119
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	19.541.286	-
Penyisihan Piutang Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		19.541.286	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		19.541.286	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.18	7.854.215.654	7.775.495.654
Aset Lain-Lain	C.19	1.994.248.710.782	2.501.523.762.400
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.20	(893.789.607.735)	(967.209.424.954)
Jumlah Aset Lainnya		1.108.313.318.701	1.542.089.833.100
JUMLAH ASET		2.915.708.390.794	3.441.286.386.234
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.21	4.357.312.149	6.611.032.907
Uang Muka dari KPPN	C.22	16.831.000	18.938.471
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.23	-	1.182.408
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.374.143.149	6.631.153.786
JUMLAH KEWAJIBAN		4.374.143.149	6.631.153.786
EKUITAS			
Ekuitas	C.24	2.911.334.247.645	3.434.655.232.448
JUMLAH EKUITAS		2.911.334.247.645	3.434.655.232.448
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.915.708.390.794	3.441.286.386.234

III. LAPORAN OPERASIONAL**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI****LAPORAN OPERASIONAL****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		5.300.549.997	2.396.995.596
JUMLAH PENDAPATAN		5.300.549.997	2.396.995.596
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	214.433.233.366	208.337.577.246
Beban Persediaan	D.3	29.347.040.093	30.757.714.036
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.180.157.961.801	2.218.784.029.453
Beban Pemeliharaan	D.5	34.454.741.640	37.580.345.894
Beban Perjalanan Dinas	D.6	755.509.748.479	595.672.353.870
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	790.217.602.756	1.882.412.351.506
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	243.652.441.767	398.394.930.595
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(17.417.455)	4.824.477
JUMLAH BEBAN		5.247.755.352.447	5.371.944.127.077
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.242.454.802.450)	(5.369.547.131.481)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		(707.939.196.549)	(2.696.346.959.672)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		921.799.141	462.370.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		708.860.995.690	2.696.809.329.672
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		34.143.300.262	30.190.719.980
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		177.386.687.953	92.276.244.090
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		143.243.387.691	62.085.524.110
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10	(673.795.896.287)	(2.666.156.239.692)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.916.250.698.737)	(8.035.703.371.173)
Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(5.916.250.698.737)	(8.035.703.371.173)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
EKUITAS AWAL	E.1	3.434.655.232.448	7.228.543.249.511
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.916.250.698.737)	(8.035.703.371.173)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3.1	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(20.399.194.336)	67.695.718.473
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	26.509.500	5.216.650.987
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(20.488.562.567)	60.901.552.896
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	62.858.731	1.577.514.590
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	5.413.328.908.270	4.174.119.635.637
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(523.320.984.803)	(3.793.888.017.063)
EKUITAS AKHIR	E.5	2.911.334.247.645	3.434.655.232.448

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yakni:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan penggabungan dari Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Eks-Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Ditjen PPMD dan Ditjen PKP dari Kementerian Dalam Negeri, serta Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2Trans), Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT), dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk mewujudkan NAWACITA, khususnya Cita ke-3 yaitu: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, terdapat sembilan program yang akan menjadi prioritas kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang disebut NAWAKERJA, yaitu:

- a. Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015.
- b. Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang.
- c. Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDes.

- d. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan.
- e. Pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri.
- f. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp1,4 miliar per desa secara bertahap.
- g. Penyaluran modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa.
- h. *Pilot project* sistem pelayanan publik jaringan koneksi *online* di 5.000 desa.
- i. “*Save villages*” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil melalui pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi.

Sebagai entitas pelaporan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan gabungan dari beberapa entitas pelaporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), yaitu:

Tabel 1 Satker UAPPA-E1

KODE SATKER	NAMA SATKER
067 02	Inspektorat Jenderal
067 03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
067 04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
067 05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
067 06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
067 07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
067 08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
067 09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi
067 10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdiri dari 9 UKE 1 dengan jumlah satker berdasarkan aplikasi e-Rekon adalah sebanyak 288 Satker yang merupakan satker aktif dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode E1	Nama UKE 1	Total Satker
1	06702	Inspektorat Jenderal	1
2	06703	Ditjen PPMD	100
3	06704	Ditjen PKP	1
4	06705	Ditjen PDTu	1
5	06706	Ditjen PDT	25
6	06707	Ditjen PKP2Trans	72
7	06708	Ditjen PKTrans	76
8	06709	Balilatfo	11
9	06710	Setjen KDPDTT	1
Total			288

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker menggunakan Aplikasi SAIBA yang selanjutnya melakukan *upload* dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian disusun dengan mengunduh dari Aplikasi e-rekon-LK Satker.

Mulai tahun 2016 sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5568/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pedoman Rekonsiliasi tidak lagi dilakukan proses Rekonsiliasi antara UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Proses rekonsiliasi hanya dilakukan oleh satker dengan KPPN setempat.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari

KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab

Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan

BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan
Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

Piutang Jangka

Panjang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban*Kewajiban*

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Tahun 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 29 kali. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Perubahan Anggaran Setelah Revisi Per Jenis Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	517.950.000	517.950.000
Pendapatan Bunga	-	-
Pendapatan iuran dan denda	-	-
Pendapatan Lain-lain	2.000.000	2.000.000
Jumlah Pendapatan	519.950.000	519.950.000
Belanja		
Belanja Pegawai	283.574.706.000	283.815.842.000
Belanja Barang	4.588.681.586.000	5.322.307.401.000
Belanja Modal	276.212.595.000	282.478.969.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	5.148.468.887.000	5.888.602.212.000

Adapun rincian Perubahan Anggaran Belanja Setelah Revisi per Program Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Per Program Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Program	Anggaran Belanja	Anggaran Belanja setelah Revisi
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	57.060.378.000,00	63.294.966.000,00
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.825.336.985.000,00	3.469.077.267.000,00
Program Pembangunan Kaw asan Perdesaan	332.081.502.000,00	332.581.502.000,00
Program Pengembangan Daerah tertentu	262.792.792.000,00	262.792.792.000,00
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	320.060.761.000,00	320.060.761.000,00
Program Penyiapan Kaw asan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	391.803.585.000,00	391.254.350.000,00
Program Pembangunan dan Pengembangan Kaw asan Transmigrasi	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00
program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan informasi	280.557.341.000,00	305.861.891.000,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KDPDTT	278.775.543.000,00	343.678.683.000,00
Jumlah	5.148.468.887.000,00	5.888.602.212.000,00

Sumber dana program kegiatan berasal dari rupiah murni, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Adapun rincian perubahan revisi anggaran belanja berdasarkan sumber dana dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	2018		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	KENAIKAN (PENURUNAN) ANGGARAN BELANJA
Rupiah Murni	4.756.438.201.000	4.756.073.061.000	(365.140.000)
Pinjaman Luar Negeri	328.901.686.000	1.065.767.478.000	736.865.792.000
Hibah Luar Negeri	63.129.000.000	66.761.673.000	3.632.673.000
Jumlah Anggaran Belanja	5.148.468.887.000	5.888.602.212.000	740.133.325.000

Berdasarkan tabel rincian di atas, terdapat penghematan anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp365.140.000,00; dan penambahan anggaran dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp736.865.792.000,00; serta Hibah Luar Negeri sebesar Rp3.632.673.000,00, sehingga pada tahun 2018 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp740.133.325.000,00.

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp40.622.051.346,00*

Realisasi Pendapatan Negara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.622.051.346,00 atau mencapai 7.812,68 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp519.950.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan tahun 2018 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Akun	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Anggaran
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	517.950.000	542.063.595	104,66
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	909.849.141	-
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	11.950.000	-
4	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	1.456.000.000	-
5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	13.333.385	-
6	Pendapatan Bunga Lainnya	-	308.951	-
7	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	50.322	-
8	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	3.288.787.100	-
9	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	-	28.095.455	-
10	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	-	81.699.910	-
11	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	942.030.162	-
12	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.000.000	31.223.238.463	1.561.161,92
13	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	2.008.883.740	-
14	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	-	66.405.000	-
15	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	49.348.900	-
16	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	7.222	-
Jumlah		519.950.000	40.622.051.346	7.812,68

Realisasi Pendapatan TA 2018 sebagian besar berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL, serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Pada Klasifikasi Pendapatan terdapat Estimasi Pendapatan sebesar Rp2.000.000,00 pada akun Penerimaan Kembali

Belanja Barang TAYL. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penginputan yang dilakukan oleh Satker BPMD Kabupaten Lombok Barat (350334) Ditjen PPMD pada Estimasi Pendapatan.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2018 dibandingkan dengan TA 2017 terdapat kenaikan sebesar 100,06 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Bunga, Pendapatan Iuran dan Denda, serta Pendapatan Lain-lain. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2.919.862.736	2.364.994.158	23,46
Pendapatan Jasa	-	84.749.892	(100,00)
Pendapatan Bunga	123.488.023	-	-
Pendapatan iuran dan Denda	3.288.787.100	404.428.290	713,19
Pendapatan Lain-lain	34.289.913.487	17.450.903.879	96,49
Jumlah	40.622.051.346	20.305.076.219	100,06

Realisasi Anggaran Pendapatan per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Realisasi Anggaran Pendapatan
Per Unit Kerja Eselon I Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%Realisasi Anggaran
Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	%
67,01	Kementerian	-	-	-
067.02	Inspektorat Jenderal	-	466.615.330	-
067.03	Ditjen PPMD	2.000.000	17.492.000.322	874600,02
067.04	Ditjen PKP	-	3.253.406.759	-
067.05	Ditjen PDTu	-	5.592.450.657	-
067.06	Ditjen PDT	-	2.447.011.812	-
067.07	Ditjen PKP2TRans	-	4.147.972.106	-
067.08	Ditjen PKTrans	-	2.040.787.981	-
067.09	Balilafpo	517.950.000	1.824.969.555	352,34
067.10	Sekretariat Jenderal	-	3.356.836.824	-
	JUMLAH	519.950.000	40.622.051.346	7.812,68

Rincian Jenis Pendapatan sesuai Akun Pendapatan Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Jenis Pendapatan Sesuai Akun
TA 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
	Pendapatan PNPB Lainnya		
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan		
423111	Pendapatan penjualan hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	-	560.284.715
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	542.063.595	-
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	909.849.141	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	11.950.000	462.370.000
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.456.000.000	1.301.089.443
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan	-	41.250.000
	Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2.919.862.736	2.364.994.158
4232	Pendapatan Jasa		
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	74.811.745
	Jumlah Pendapatan Jasa	-	74.811.745
4257	Pendapatan Bunga		
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	308.951	9.938.147
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	13.333.385	-
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	50.322	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	28.095.455	-
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	81.699.910	-
	Jumlah Pendapatan Bunga	123.488.023	9.938.147
4258	Pendapatan Iuran dan Denda		
425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	3.288.787.100	398.822.335
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	-	5.605.955
	Jumlah Pendapatan Iuran dan Denda	3.288.787.100	404.428.290
4259	Pendapatan Lain-Lain		
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	3.336.000
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	-	5.000.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	942.030.162	91.524.162
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	31.223.238.463	11.598.977.572
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	2.008.883.740	2.235.961.741
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	-	24.087.176
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bansos TAYL	-	3.477.707.750
423971	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	10.915.800
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	66.405.000	-
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	49.348.900	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	7.222	3.393.678
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	34.289.913.487	17.450.903.879
	Jumlah	40.622.051.346	20.305.076.219

Terdapat perubahan akun pada LRA Pendapatan dari akun 423xxx menjadi 425xxx pada Tahun 2018 sesuai dengan Kepdirjen No.Kep-211/PB/2018 Tanggal 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan klasifikasi akun Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang sebelumnya masuk dalam Pendapatan Jasa menjadi Pendapatan Bunga.

B.2. BELANJA

*Realisasi
Belanja
Rp5.460.676.35
8.438,00*

Realisasi Belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada TA 2018 adalah sebesar Rp5.460.676.358.438,00 atau 92,73 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.888.602.212.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

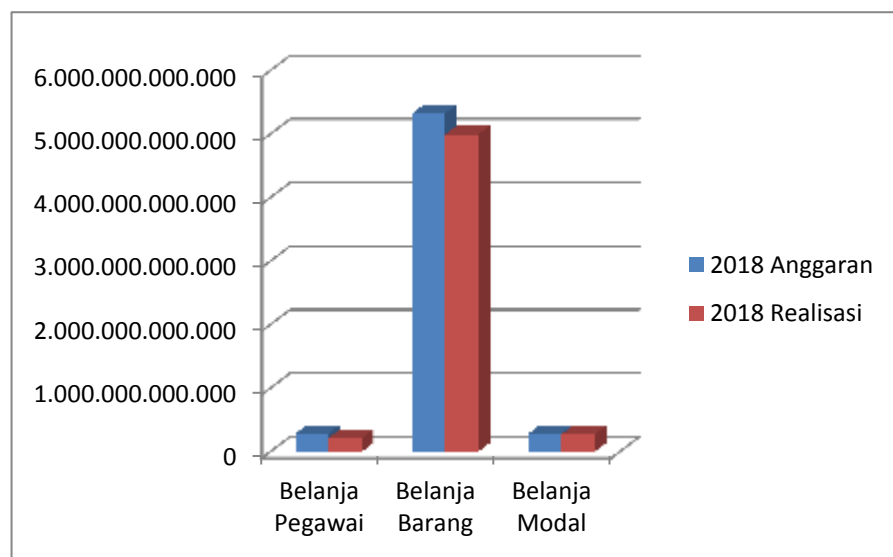
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2018*

(Dalam Rupiah)

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	283.815.842.000	214.597.760.763	75,61
Belanja Barang	5.322.307.401.000	4.992.527.011.594	93,80
Belanja Modal	282.478.969.000	273.631.598.204	96,87
Total Belanja Kotor	5.888.602.212.000	5.480.756.370.561	93,07
Pengembalian Belanja	-	20.080.012.123	-
Total Belanja	5.888.602.212.000	5.460.676.358.438	92,73

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2018 hanya mencapai sebesar 75,61 persen. Hal ini disebabkan karena kelebihan penganggaran tunjangan kinerja yang semula dianggarkan naik dari 47 persen menjadi 70 persen, namun realisasinya hanya naik dari 47 persen menjadi 60 persen. Disamping itu, adanya penundaan penerimaan CPNS 2018 juga menyebabkan realisasi belanja pegawai hanya mencapai 75,61 persen dari anggaran.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan Rincian Anggaran dan Realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Program
Tahun Anggaran 2018*

Dalam Rupiah

Program	Tahun 2018	
	Anggaran	Realisasi
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	63.294.966.000,00	58.902.151.724,00
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.469.077.267.000,00	3.187.739.449.239,00
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	332.581.502.000,00	324.574.582.380,00
Program Pengembangan Daerah Tertentu	262.792.792.000,00	249.224.927.913,00
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	320.060.761.000,00	299.776.617.276,00
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	391.254.350.000,00	372.603.775.721,00
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	400.000.000.000,00	366.059.786.266,00
program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan informasi	305.861.891.000,00	285.918.261.574,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KDPDTT	343.678.683.000,00	315.876.806.345,00
Jumlah	5.888.602.212.000,00	5.460.676.358.438,00

Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 30,56 persen dibandingkan pada TA 2017. Hal ini disebabkan karena kenaikan belanja barang dan belanja modal.

Rincian perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja
TA 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	214.433.233.366	208.337.577.246	2,93
Belanja Barang	4.972.694.878.931	3.781.100.564.852	31,51
Belanja Modal	273.548.246.141	192.910.628.456	41,80
Jumlah	5.460.676.358.438	4.182.348.770.554	30,56

*Belanja
Pegawai
Rp214.433.233.
366,00*

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp214.433.233.366,00 dan Rp208.337.577.246,00 atau terjadi kenaikan sebesar 2,93 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan karena kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dari 47% menjadi 60% pada Tahun 2018.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Per Unit Kerja Eselon I Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Estimasi Anggaran	Realisasi
067.02	Inspektorat Jenderal	13.964.289.000	11.737.263.450
067.03	Ditjen PPMD	20.000.000.000	17.836.324.796
067.04	Ditjen PKP	15.682.124.000	15.148.063.907
067.05	Ditjen PDTu	21.324.657.000	16.126.102.000
067.06	Ditjen PDT	27.465.826.000	14.388.559.595
067.07	Ditjen PKP2TRans	35.345.900.000	28.432.545.049
067.08	Ditjen PKTrans	34.000.000.000	25.603.367.725
067.09	Balilatfo	64.428.310.000	52.184.640.762
067.10	Sekretariat Jenderal	51.604.736.000	32.976.366.082
	JUMLAH	283.815.842.000	214.433.233.366

Perbandingan rincian realisasi Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	118.760.366.820	124.261.953.303	(4,43)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	183.750.000	183.750.000	-
Belanja Lembur	4.240.446.324	14.746.387.384	(71,24)
Belanja Tunjangan Khusus & Pegawai Transito	91.413.197.619	70.732.745.112	29,24
Jumlah Belanja Kotor	214.597.760.763	209.924.835.799	2,23
Pengembalian Belanja Pegawai	164.527.397	1.587.258.553	(89,63)
Jumlah Belanja	214.433.233.366	208.337.577.246	2,93

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp4.972.694.878.931,00*

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.972.694.878.931,00 dan Rp3.781.100.564.852,00. Realisasi Belanja Barang pada Tahun 2018 mencapai 93,43 persen dari anggaran belanja barang Tahun 2018 sebesar Rp5.322.307.401.000,00.

Belanja Barang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per Eselon I
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Estimasi Anggaran	Realisasi	NAIK (TURUN) %
067.02	Inspektorat Jenderal	48.563.382.000	46.402.874.589	95,55
067.03	Ditjen PPMD	3.442.006.307.000	3.163.134.188.907	91,90
067.04	Ditjen PKP	314.439.378.000	306.971.391.973	97,62
067.05	Ditjen PDTu	239.677.215.000	231.328.390.213	96,52
067.06	Ditjen PDT	288.429.490.000	281.228.208.681	97,50
067.07	Ditjen PKP2TRans	246.777.905.000	237.534.191.959	96,25
067.08	Ditjen PKTrans	253.062.882.000	232.776.323.175	91,98
067.09	Balilafpo	209.913.991.000	202.922.411.669	96,67
067.10	Sekretariat Jenderal	279.436.851.000	270.396.897.765	96,76
	JUMLAH	5.322.307.401.000	4.972.694.878.931	93,43

Realisasi belanja barang pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 31,51 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Belanja Perjalanan Luar Negeri, Belanja Barang Non Operasional, serta Belanja Jasa. Adapun perbandingan Belanja Barang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 dan 2017 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Barang per Jenis Belanja
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	106.178.672.666	94.034.020.005	12,92
Belanja Barang Non Operasional	629.366.817.697	308.038.401.345	104,31
Belanja Barang Persediaan	26.010.603.358	28.825.411.255	(9,77)
Belanja Jasa	2.449.842.831.130	1.817.348.901.345	34,80
Belanja Pemeliharaan	34.461.957.688	37.436.481.599	(7,95)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	766.094.285.312	602.459.551.642	27,16
Belanja Perjalanan Luar negeri	3.679.401.879	1.030.490.032	257,05
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	797.260.790.834	609.411.867.109	30,82
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	179.631.651.030	292.999.993.000	(38,69)
Jumlah Belanja Kotor	4.992.527.011.594	3.791.585.117.332	31,67
Pengembalian Belanja	19.832.132.663	10.484.552.480	89,16
Jumlah Belanja	4.972.694.878.931	3.781.100.564.852	31,51

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp273.548.246.
141,00*

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp273.548.246.141,00 dan Rp192.910.628.456,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 41,80 persen dibandingkan TA 2017 disebabkan oleh adanya penambahan belanja modal untuk Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Adapun Rincian Belanja Modal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Modal per Unit Kerja Eselon I
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	767.295.000	762.013.685	99,31
067.03	Ditjen PPMD	7.070.960.000	6.768.935.536	95,73
067.04	Ditjen PKP	2.460.000.000	2.455.126.500	99,80
067.05	Ditjen PDTu	1.790.920.000	1.770.435.700	98,86
067.06	Ditjen PDT	4.165.445.000	4.159.849.000	99,87
067.07	Ditjen PKP2TRans	109.130.545.000	106.637.038.713	97,72
067.08	Ditjen PKTrans	112.937.118.000	107.680.095.366	95,35
067.09	Balilatfo	31.519.590.000	30.811.209.143	97,75
067.10	Sekretariat Jenderal	12.637.096.000	12.503.542.498	98,94
	JUMLAH	282.478.969.000	273.548.246.141	96,84

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Per Jenis Belanja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Tahun 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.839.716.714	30.769.171.993	26,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.953.317.543	29.739.620.788	172,21
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	153.048.517.947	131.435.139.932	16,44
Belanja Modal Lainnya	790.046.000	1.095.793.525	(27,90)
Jumlah Belanja Kotor	273.631.598.204	193.039.726.238	41,75
Pengembalian	83.352.063	129.097.782	(35,43)
Jumlah Belanja	273.548.246.141	192.910.628.456	41,80

Terdapat pengembalian Belanja Modal sebesar Rp83.352.063,00 yang berasal dari pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.245.601,00 dan pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp53.106.462,00.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja
Peralatan dan
Mesin
Rp38.839.716.714,00*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp38.839.716.714,00 dan Rp30.769.171.993,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 26,23 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Unit Kerja Eselon I Balai Penelitian dan Pengembangan, Pelatihan dan Pendidikan, dan Informasi akibat adanya dua balai yang baru berdiri yaitu Balai Latihan Masyarakat Ambon dan Balai Latihan Masyarakat Jayapura.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per Unit Kerja Eselon I Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	767.295.000	762.013.685	99,31
067.03	Ditjen PPMD	2.650.202.000	2.569.884.772	96,97
067.04	Ditjen PKP	2.460.000.000	2.455.126.500	99,80
067.05	Ditjen PDTu	1.650.920.000	1.632.255.700	98,87
067.06	Ditjen PDT	4.165.445.000	4.159.849.000	99,87
067.07	Ditjen PKP2TRans	4.485.238.000	4.195.354.069	93,54
067.08	Ditjen PKTrans	1.725.950.000	1.595.977.900	92,47
067.09	Balilatfo	13.147.623.000	12.645.834.968	96,18
067.10	Sekretariat Jenderal	8.904.711.000	8.823.420.120	99,09
	JUMLAH	39.957.384.000	38.839.716.714	97,20

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.591.091.714	29.944.008.193	28,88
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	248.625.000	825.163.800	(69,87)
Jumlah Belanja Kotor	38.839.716.714	30.769.171.993	26,23
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	38.839.716.714	30.769.171.993	26,23

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp80.923.071.942,00 dan Rp29.739.620.788,00. Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 172,11 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2018
(Dalam Rupiah)*

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.03	Ditjen PPMD	4.420.758.000	4.199.050.764	94,98
067.07	Ditjen PKP2TRans	44.432.089.000	43.889.160.450	98,78
067.08	Ditjen PKTrans	11.761.949.000	11.567.989.675	98,35
067.09	Balilatfo	17.829.683.000	17.626.748.675	98,86
067.10	Sekretariat Jenderal	3.692.385.000	3.640.122.378	98,58
	JUMLAH	82.136.864.000	80.923.071.942	98,52

Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Jenis Belanja pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per Jenis Belanja Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2018	T.A 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.169.219.483	25.406.857.488	156,50
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	74.643.500	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.956.559.476	749.147.500	161,17
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	25.200.000	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	13.727.695.084	3.583.615.800	283,07
Jumlah Belanja Kotor	80.953.317.543	29.739.620.788	172,21
Pengembalian Belanja Modal	30.245.601	-	-
Jumlah Belanja	80.923.071.942	29.739.620.788	172,11

Kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagian besar disebabkan adanya kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Unit Kerja Eselon I Balai Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang terdapat pada satker:

1. Balai Latihan Masyarakat Ambon sebesar Rp12.715.600.000,00 untuk merenovasi gedung Balai Latihan Masyarakat Ambon yang baru bergabung;
2. Pusklat sebesar Rp808.383.226,00;
3. Balai Besar Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Jakarta sebesar Rp412.568.902,00;
4. Balai Besar Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan

Transmigrasi Yogyakarta sebesar Rp672.793.439,00;

5. Balai Latihan Masyarakat Makassar sebesar Rp191.881.000;
6. Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin sebesar Rp424.922.000,00;
7. Balai Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Denpasar sebesar Rp751.150.108,00;
8. Balai Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Pekanbaru sebesar Rp645.508.000,00.

Terdapat pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.245.601,00 yang berasal dari pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan pada Balai Pelatihan Masyarakat Desa, PDT, dan Transmigrasi Denpasar sebesar Rp12.945.172,00 serta Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 17.300.429,00 yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp3.932.234,00; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebesar Rp9.854.025,00; serta Balai Pelatihan Masyarakat Desa, PDT, dan Transmigrasi Denpasar sebesar Rp3.514.170,00.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp152.995.411.485,00 dan Rp131.306.042.150,00. Realisasi Belanja Modal JIJ TA 2018 mencapai 95,90 persen dari Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

*Belanja Modal
JIJ
Rp152.995.411.
485,00*

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal JIJ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal JIJ
per Unit Kerja Eselon I Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Estimasi Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)
067.07	Ditjen PKP2TRans	60.213.218.000	58.552.524.194	97,24
067.08	Ditjen PKTrans	98.843.069.000	93.970.561.791	95,07
067.09	Balilatif	475.984.000	472.325.500	99,23
	JUMLAH	159.532.271.000	152.995.411.485	95,90

Perbandingan Rincian Belanja Modal JIJ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Modal JIJ per Jenis Belanja
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2018	T.A. 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.243.529.077	67.645.757.522	(10,94)
Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan Jalan	79.350.800	-	-
Belanja Modal Irigasi	3.477.489.000	12.701.112.474	(72,62)
Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan Irigasi	3.496.000	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	198.500.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	80.163.695.570	49.118.635.836	63,20
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	275.149.000	-	-
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	8.805.808.500	1.771.134.100	397,18
Jumlah Belanja Kotor	153.048.517.947	131.435.139.932	16,44
Pengembalian Belanja Modal	53.106.462	129.097.782	(58,86)
Jumlah Belanja	152.995.411.485	131.306.042.150	16,52

Terdapat kenaikan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 sebesar 16,52 persen dibandingkan TA 2017. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan karena adanya Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan kegiatan pembangunan kawasan perkotaan baru di Kawasan Transmigrasi serta kenaikan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Balai Pelatihan Masyarakat Desa, PDT, dan Transmigrasi Denpasar sesuai dengan SPK.17/BLM-DPS/K/05/2018 sebesar Rp472.325.500,00.

Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp53.106.462,00 berasal dari Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp20.001.883,00 yang terdapat pada satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau sebesar Rp13.500.000,00; Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kab. Muna Barat sebesar Rp2.797.872,00; serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kolaka Timur sebesar Rp3.704.011,00.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya
Rp790.046.000,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp790.046.000,00 dan Rp1.095.793.525,00 Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami penurunan sebesar 27,90 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya per Unit Kerja Eselon I Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.05	Ditjen PDTu	140.000.000	138.180.000	98,70
067.08	Ditjen PKTrans	606.150.000	545.566.000	90,01
067.09	Balilatfo	66.300.000	66.300.000	100
067.10	Sekretariat Jenderal	40.000.000	40.000.000	100
	JUMLAH	852.450.000	790.046.000	92,68

Perbandingan Rincian Belanja Modal Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Rincian Belanja Modal Lainnya per Jenis Belanja Tahun 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2018	T.A 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	246.430.000	1.047.049.525	(76,46)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/ atau Aset Lainnya	543.616.000	48.744.000	1.015,25
Jumlah Belanja Kotor	790.046.000	1.095.793.525	(27,90)
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja	790.046.000	1.095.793.525	(27,90)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**ASET LANCAR**

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp581.833.398.323,00 dan Rp400.839.036.015,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji sebagai berikut :

*Rincian Aset Lancar
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

No.	Aset Lancar	2018	2017
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.831.000	18.938.471
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	1.182.986
3	Piutang Bukan Pajak	14.895.514	964.895.514
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(74.477)	(4.824.477)
5	Piutang Bukan Pajak (Netto)	14.821.037	960.071.037
6	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan	88.468.100	88.468.100
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/	(442.338)	(442.338)
8	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	88.025.762	88.025.762
9	Persediaan	581.713.720.524	399.770.817.759
Jumlah		581.833.398.323	400.839.036.015

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp16.831.000,00*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar

Rp16.831.000,00 dan Rp18.938.471,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 per unit kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Unit Kerja	Tahun 2018	Tahun 2017
Ditjen PPMD	0,00	8.976.970,00
Ditjen PKP2Trans	10.781.000,00	3.181.501,00
Ditjen PKTrans	0,00	6.780.000,00
Balilatfo	6.050.000,00	0,00
Jumlah	16.831.000,00	18.938.471,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.831.00,00 terdapat pada Unit Kerja Eselon I Dirtjen PKP2Trans dan Balilatfo. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca 31 Desember 2018 dan baru dipertanggungjawabkan pada awal Tahun 2019.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen PKP2Trans Per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.781.000,00 terdapat pada satker:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang merupakan setoran UP Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.801.000,-. Satker telah menyetorkan kembali tanggal 07 Januari 2019 dengan NTB : 000000502866 NTPN: 03E240005TK02CLP (bukti setor terlampir).
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak – Fak yang merupakan setoran UP Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.980.000,-. Satker telah menyetorkan kembali tanggal 08 Januari 2019 dengan 2 kali penyetoran yaitu sebesar Rp1.708.000,- dengan NTB :

190108797053 dan NTPN:487905O14SCHRIE2 serta penyetoran kedua sebesar Rp272.000,- dengan NTB: 190108786037 dan NTPN :14BE35K0IOK8FQE2 (bukti setor terlampir).

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Balilatfo Per 31 Desember 2018 terdapat pada satker Balilatfo yang terlambat disetor karena adanya kesalahan penghitungan sebesar Rp6.050.000. Tetapi sisa setoran pengembalian UP tersebut sudah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 4 Januari 2019 melalui Bank Mandiri sesuai dengan NTPN No. D72C85FP77SJU8C8 dan NTB No.000000979666 (bukti setor terlampir).

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp1.182.986,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Nama Akun	Tahun 2018	Tahun 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	1.182.986
Jumlah	-	1.182.986

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2018 sebesar Rp0,00 (Adapun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Per Desember Tahun 2018 terlampir).

C.3 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak
Rp14.895.514,00*

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp14.895.514,00 dan Rp964.895.514,00 yang merupakan hak atau pengakuan

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Ditjen PPMD	-	950.000.000
Ditjen PKTrans	14.895.514	14.895.514
Jumlah	14.895.514	964.895.514

Adapun piutang bukan pajak pada Ditjen PPMD di tahun 2017 sebesar Rp 950.000.000,00 telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tahun 2018 sehingga nilai piutang bukan pajak pada Ditjen PPMD sebesar Rp 0,00 di tahun 2018 (bukti setor terlampir). Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PKTrans merupakan piutang bukan pajak pada sakter Disnakertrans Kabupaten Bima.

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
(Rp74.477,00)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp74.477,00 dan Rp4.824.477,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Tahun 2017 merupakan penyisihan atas piutang Ditjen PKTrans yang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, dapat dilihat pada tabel berikut:

*Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Piutang bukan pajak - per UKE-1
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
Ditjen PPMD	-	4.750.000
Ditjen PKTrans	74.777	74.777
Total	74.777	4.824.777

C.5 Piutang Bukan Pajak (*Netto*)

Piutang Bukan Pajak (netto)
Rp14.821.0137

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp14.821.0137 dan Rp960.071.037 adalah milik Dinas Nakertrans Kab. Bima Ditjen PKTrans yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya oleh satker. Nilai Piutang Bukan Pajak (*Netto*) berasal dari selisih Piutang Bukan Pajak (*Bruto*) dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto)
Tahun 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Ditjen PPMD	-	945.250.000
Ditjen PKTrans	14.821.037	14.821.037
Jumlah	14.821.037	960.071.037

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp88.468.100,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp88.468.100,00 dan Rp88.468.100,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Bagian Lancar TP	88.468.100	88.468.100
2	Bagian Lancar TGR	0	0
Jumlah		88.468.100	88.468.100

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp.88.468.100,00 dan Rp.88.468.100,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai pada 17 pegawai (debitur) yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang pada Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebesar Rp88.468.100,00. Adapun rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per debitur Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Debitur
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nom inal
1	SPKMKN atas nama Ir. Supriatna, M.Si	5.875.500
2	SPKMKN atas nama Munadi, S.Pd	5.529.800
3	SPKMKN atas nama Drs. Putut Edy Sasono, M.Si	6.276.000
4	SPKMKN atas nama Mulyanto	3.675.000
5	SPKMKN atas nama Ir. Alin Yurianto, M.Si	5.736.000
6	SPKMKN atas nama Ir. Alin Yurianto, M.Si	5.529.800
7	SPKMKN atas nama Dorodjati	4.551.000
8	SPKMKN atas nama Solichin	5.529.800
9	SPKMKN atas nama Ir. R. Harry Suhargono, MM	4.577.000
10	SPKMKN atas nama Ir. Mis Yanuarizah	4.086.800
11	SPKMKN atas nama Jekson, S.Sos	6.643.000
12	SPKMKN atas nama Imam Moerdo Koentjoro, BE	4.551.000
13	SPKMKN atas nama Supraptiningsih	4.086.800
14	SPKMKN atas nama Egi Tjahhergi, BE	5.460.000
15	SPKMKN atas nama Titiek Dw inarw ati	6.643.000
16	SPKMKN atas nama Prayitno	5.529.800
17	SPKMKN atas nama Ir. Erna Novianti	4.186.800
18	SPKMKN atas nama Ir. Joni Anw ar	500
19	SPKMKN atas nama Ir. Joni Anw ar	500
Total Rincian Bagian Lancar TP/TGR		88.468.100

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp(442.338,00)*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp442.338,00 dan Rp442.338,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar milik Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Ditjen PKTrans yang merupakan pengembalian perjalanan dinas. Estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan

Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
TA 2018*

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	88.468.100	0,50%	442.338
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	88.468.100		442.338
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	88.468.100		442.338

C.8 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR (Netto)
Rp88.025.762,00*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp88.025.762,00 dan Rp88.025.762,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai pada 17 pegawai (debitur) yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang pada Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebesar Rp88.468.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)
Tahun Anggaran 2018*

(Dalam Rupiah)

No.	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Lancar	1	88.468.100	(442.338)	88.025.762
2	Kurang Lancar	-			
3	Diragukan	-			
4	Macet	-			
Jumlah		1	88.468.100	(442.338)	88.025.762

C.9 Persediaan

Persediaan
Rp581.713.720.
524,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp581.713.720.524,00 dan Rp399.770.817.759,00.

Posisi Persediaan per unit Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Persediaan per Unit Eselon I
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-18	31-Des-17
067.02	Inspektorat Jenderal	15.208.050	18.262.500
067.03	Ditjen PPMD	98.155.103.997	42.506.657.010
067.04	Ditjen PKP	148.223.892.426	145.823.167.388
067.05	Ditjen PDTu	141.669.898.343	100.212.622.594
067.06	Ditjen PDT	176.671.708.420	89.047.875.697
067.07	Ditjen PKP2Trans	8.619.262.596	13.312.253.624
067.08	Ditjen PKTRans	8.273.510.492	8.798.008.461
067.09	Balilatfo	63.627.400	48.505.355
067.10	Setjen	21.508.800	3.465.130
JUMLAH		581.713.720.524	399.770.817.759

Adapun rincian persediaan per akun tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Persediaan per Akun
Tahun Anggaran 2018*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31-Des-18
117111	Barang Konsumsi	229.429.300
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	455.100
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	140.000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	55.422.503.934
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	229.902.170.180
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	246.885.386.731
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	396.000.000
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	748.739.734
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	46.616.543.355
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	1.512.352.190
JUMLAH		581.713.720.524

Adapun Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges (117121) sebesar Rp140.000,00 berupa persediaan materai yang seharusnya masuk kategori persediaan barang konsumsi pada

Sekretariat Jenderal. Sementara itu, Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat- Dalam Proses (117129) berupa bangunan rumah transmigran (RTJK) yang belum selesai dibangun pada tahun 2018 senilai Rp1.512.352.190,00 (35 unit) pada Dinas Nakertrans Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun rincian persediaan per akun per unit kerja eselon I terlampir.

ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset Tetap pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.225.542.132.484,00 dan Rp1.498.357.517.119,00. Rincian Aset Tetap terdiri dari:

*Rincian Aset Tetap
31 Desember 2018 dan TA 2017
(Dalam Rupiah)*

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN) %
Tanah	122,404,255,697	120,992,735,697	1.17
Peralatan dan Mesin	344,347,161,374	331,245,725,328	3.96
Gedung dan Bangunan	329,194,678,847	330,387,908,090	(0.36)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	732,005,217,423	965,108,724,575	(24.15)
Aset Tetap Lainnya	159,755,240,972	212,537,171,053	(24.83)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11,181,884,170	24,495,714,219	(54.35)
Akumulasi Penyusutan	(473,346,305,999)	(486,410,461,843)	(2.69)
Jumlah	1,225,542,132,484	1,498,357,517,119	(18.21)

C.10 Tanah

*Tanah
Rp122.404.255.
697,00*

Nilai aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar dan Rp122.404.255.697,00 dan Rp120.992.735.697,00. Terdapat kenaikan nilai aset Tanah pada TA 2018 sebesar Rp1.411.520.000,00 atau 1,17 persen dari tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya penambahan saldo awal pada satker Balai Latihan Masyarakat Ambon yang merupakan satker baru tahun 2018 pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Rincian aset Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 per Unit Kerja Eselon 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tanah per Unit Eselon I
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.09	Balilatfo	560.762.314.000	506.179.801.000	54.582.513.000	10,78%
067.10	Setjen	80.748.400.000	21.597.751.359	59.150.648.641	273,87%
Koreksi atas Revaluasi		(519.106.458.303)	(406.784.816.662)		
JUMLAH		122.404.255.697	120.992.735.697	1.411.520.000	1,17%

Terdapat Koreksi atas Revaluasi pada aset tetap berupa Tanah sebesar (Rp519.106.458.303,00) berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor NK-067/54/TO-REVALBMN/2019 Tanggal 21 Februari 2019.

Rincian mutasi/perubahan nilai Tanah pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Tanah
Periode TA 2018*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI
Saldo Awal	120.992.735.697
Mutasi tambah:	38.785.005.159
Saldo Awal	1.411.520.000
Transfer Masuk	37.373.485.159
Mutasi kurang:	(37.373.485.159)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	(37.373.485.159)
Saldo Akhir	122.404.255.697

Mutasi tambah berupa Transfer Masuk dengan nilai sebesar Rp37.373.485.159,00 terdapat pada satker Disnakertrans Kabupaten Bulungan sebesar Rp3.170.911.652,00 dan Ditjen PKP2Trans sebesar Rp.34.202.573.507,00.

Mutasi tambah berupa Saldo Awal sebesar Rp1.411.520.000,00 terjadi karena adanya satker Balai Latihan Masyarakat Ambon pada Balilatfo dimana Balai Latihan Masyarakat Ambon baru bergabung pada tahun 2018.

Mutasi kurang berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset

Lainnya (Penghentian Aset Dari Pengguna) sebesar Rp37.373.485.159,00 terjadi di Disnakertrans Kabupaten Bulungan sebesar Rp3.170.911.652,00 dan Ditjen PKP2Trans sebesar Rp.34.202.573.507,00.

Rincian Aset Tanah yang dimiliki Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada masing-masing satker per 31 Desember 2018 sebesar Rp122.404.255.697,- dapat dilihat pada tabel berikut:

*Daftar Aset Tanah pada masing-masing Satker
Per 31 Desember 2018*

(Dalam Rupiah)

NAMA SATKER	Nilai
Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu	172.830.565.000
Balai Besar Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Jakarta	71.275.278.000
Balai Besar Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Yogyakarta	67.449.446.000
Balai Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Makassar	62.956.953.000
Balai Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Banjarmasin	41.464.500.000
Balai Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Denpasar	129.778.125.000
Balai Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Pekanbaru	13.595.927.000
Balai Latihan Masyarakat Ambon	1.411.520.000
Sekretariat Jenderal KDPDTT	80.748.400.000
Jumlah Tanah Sebelum Revaluasi	641.510.714.000
Koreksi atas Revaluasi	(519.106.458.303)
JUMLAH	122.404.255.697

Adapun rincian bukti kepemilikan tanah (terlampir).

C.11 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp344.347.161.
374,00*

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp344.347.161.374,00 dan Rp331.245.725.328,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp13.101.436.046,00 atau 3,96 persen.

Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian DPDTT Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Peralatan dan Mesin Menurut Unit Kerja Eselon I
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	8.147.351.365,00	7.386.642.005,00	760.709.360	6,36%
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	14.465.015.389,00	11.959.468.117,00	2.505.547.272	18,82%
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kaw asan Perdesaan	15.768.423.170,00	13.313.296.670,00	2.455.126.500	19,36%
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	14.654.390.456,00	12.679.806.056,00	1.974.584.400	24,97%
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	12.165.056.250,00	7.907.207.250,00	4.257.849.000	9,89%
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kaw asan dan Pembangunan	43.818.391.247,00	43.058.365.186,00	760.026.061	1,99%
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kaw asan Transmigrasi	31.172.002.080,00	38.143.817.780,00	(6.971.815.700)	-8,27%
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,	95.729.915.616,00	84.270.321.283,00	11.459.594.333	10,18%
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	108.426.615.801,00	112.526.800.981,00	(4.100.185.180)	-1,24%
JUMLAH		344.347.161.374,00	331.245.725.328,00	13.101.436.046	3,96%

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Peralatan dan Mesin pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Periode Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI
Saldo Awal	331.245.725.328
Mutasi tambah:	148.753.465.376
Saldo Awal	1.282.157.555
Pembelian	36.591.617.661
Penyelesaian Pembangunan Langsung	89.965.888
Penyelesaian Pembangunan KDP	123.644.001
Reklasifikasi Masuk	7.461.001.324
Transfer Masuk	102.692.697.522
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	135.294.480
Pengembangan Nilai Aset	248.625.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	128.461.945
Mutasi kurang:	135.652.029.330
Hibah Keluar	306.929.000
Reklasifikasi Keluar	8.075.225.124
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	33.124.128.752
Usulan Barang Hibah DK/TP	8.168.585.659
Transfer Keluar	83.432.594.988
Penghapusan	2.163.130.307
Usulan Barang Hilang Ke Pengelola	381.435.500
Saldo Akhir	344.347.161.374
Akumulasi Penyusutan	(229.816.758.575)
Nilai Buku	114.530.402.799

Nilai penambahan Aset Peralatan dan Mesin pada Laporan

Neraca sebesar Rp13.101.436.046,00, sedangkan nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp38.839.716.714,00. Hal ini disebabkan karena adanya:

- Hibah Keluar Peralatan dan Mesin sebesar Rp306.929.000,00 yang terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp64.050.000,00 dan satker Ditjen PKTrans sebesar Rp242.879.000,00;
- Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.163.130.307,00 yang terdapat pada satker Ditjen PKTrans sebesar Rp1.912.344.000,00 dan Balilatfo sebesar Rp250.786.307,00;
- Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp(33.603.058.072,00) terdapat pada Ditjen PDT sebesar Rp(5.781.779.250,00); Ditjen PKP2Trans sebesar Rp(9.421.962.478,00); Ditjen PKTrans sebesar Rp(374.258.250,00); Balilatfo sebesar Rp(929.529.438,00); serta Setjen sebesar Rp(12.716.726.100,00).
- Penambahan Saldo awal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.282.157.555,00 terdapat pada Satker Balilatfo sebesar Rp425.657.555,00 dan Sekretariat Jenderal sebesar Rp856.500.000,00;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak menambah aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.919.257.325,00;
- Perolehan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.393.151,00 yang terdapat pada Satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp31.693.151,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp3.700.000,00.
- Perolehan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Pemeliharaan berupa *Coffee Maker* sebesar Rp98.000.000,00 pada Ditjen PDT.
- Adanya Transfer Masuk sebesar Rp102.692.697.522,00 terdapat pada satker Ditjen PDTu sebesar Rp375.178.400,00; Ditjen PDT sebesar Rp5.781.779.250,00; Ditjen PKP2Trans sebesar Rp46.072.199.746; Ditjen PKTrans sebesar

- Rp607.148.250,00; Balilatfo sebesar
 Rp49.310.821.576,00; serta Setjen sebesar
 Rp545.570.300,00;
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar
 Rp128.461.945,00 yang terdapat pada Balilatfo sebesar
 Rp(141.207.555,00) dan Setjen sebesar
 Rp269.669.500,00;
 - Transfer Keluar sebesar Rp83.432.594.988,00 yang
 terdapat pada Ditjen PDTu sebesar Rp32.849.700,00;
 Ditjen PKP2Trans sebesar Rp37.859.657.868,00; Ditjen
 PKP2Trans sebesar Rp232.890.000,00; Balilatfo sebesar
 Rp44.961.797.420,00; serta Setjen sebesar
 Rp345.400.000,00;
 - Usulan Barang Rusak Berat/Hilang ke Pengelola
 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar
 Rp381.435.500,00; serta
 - Usulan Hibah Dekon/TP sebesar Rp8.168.585.659,00
 yang terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar
 Rp1.756.315.059,00 dan Ditjen PKTrans sebesar
 Rp6.412.270.600,00.

C.12 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan bangunan per 31
 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar
 Rp329.194.678.847,00 dan Rp330.387.908.090,00. Terdapat
 penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan Tahun 2018
 sebesar Rp1.193.229.243,00 atau 0,36 persen.

Perbandingan rincian nilai Gedung dan Bangunan yang
 dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian DPD TT Per
 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Eselon 1
Per 31 Desember 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.03	Ditjen PPMD	1.713.971.000	1.713.971.000	0	0,00%
067.07	Ditjen PKP2TRa	124.266.934.446	117.843.317.782	6.423.616.664	5,45%
067.08	Ditjen PKTRans	42.613.365.337	62.801.361.795	(20.187.996.458)	-32,15%
067.09	Balilatfo	100.030.483.110	80.171.757.440	19.858.725.670	24,77%
067.10	Setjen	271.774.517.800	65.943.252.955	205.831.264.845	312,13%
	Koreksi atas Revaluasi	(211.204.592.846)	1.914.247.118	(213.118.839.964)	
	JUM LAH	329.194.678.847	330.387.908.090	(1.193.229.243)	-0,36%

Terdapat Koreksi atas Revaluasi pada aset tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp(211.204.592.846,00) berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor NK-067/54/TO-REVALBMN/2019 Tanggal 21 Februari 2019.

Adapun rincian mutasi/perubahan Aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan
Periode TA 2018*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI
Saldo Awal	330.387.908.090
Mutasi tambah:	406.432.667.263
Saldo Awal	511.179.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	3.106.518.319
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	55.062.925.527
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.440.234.336
Reklasifikasi Masuk	1.858.502.398
Transfer Masuk	333.047.950.950
Pengembangan Nilai Aset	2.288.605.220
Pengembangan Melalui KDP	7.696.390.513
Koreksi Kesalahan Input IP	1.420.361.000
Mutasi kurang:	(407.625.896.506)
Hibah Keluar	(1.197.678.750)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	(309.579.714.952)
Reklasifikasi Keluar	(2.156.039.708)
Pembatalan Penghapusan	(5.415.307.882)
Usulan Barang Hibah DK/TP	(62.819.750.098)
Koreksi Pencatatan	(813.622.000)
Transfer Keluar	(23.729.535.998)
Koreksi Revaluasi Aset Tahun 2017	(1.914.247.118)
Saldo Akhir	329.194.678.847
Akumulasi Penyusutan	39.039.732.598
Nilai Buku	290.154.946.249

Nilai Aset Gedung dan Bangunan pada Laporan Neraca mengalami penurunan sebesar Rp1.193.229.243,00,

sedangkan nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp80.923.071.942,00. Hal ini disebabkan karena adanya:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak menambah aset Gedung Bangunan sebesar Rp12.831.834.705,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menghasilkan Aset Jalan, Irigasi, dan Bangunan sebesar Rp3.365.165.310,00 (Ditjen PKP2Trans dan PKTrans).
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menghasilkan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.257.406.342,00 (Ditjen PPMD, Ditjen PKTrans, dan Sekretariat Jenderal);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menghasilkan Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp37.132.902,00 (Balilatfo);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bagunan yang menghasilkan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.136.737.000,00 (Ditjen PKTrans);
 - e. Belanja Modal Gedung dan Bagunan yang menghasilkan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.393.151,00 (Ditjen PKTrans dan Ditjen PKP2Trans).
- Penambahan saldo awal terdapat pada satker Balilatfo sebesar Rp511.179.000,00.
- Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp3.106.518.319,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp1.420.772.100,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp199.879.000,00; dan Balilatfo sebesar Rp1.485.867.219,00.
- Penyelesaian Pembangunan KDP sebesar Rp55.062.925.527,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp39.576.997.864,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp6.211.531.700,00; dan Balilatfo sebesar Rp9.274.395.963,00.
- Transfer Masuk sebesar Rp333.047.950.950,00 terdapat pada satker Ditjen PDT sebesar Rp8.682.342.200,00; Ditjen PKP2Trans sebesar

- Rp316.185.379.750,00; serta Balilatfo sebesar Rp8.180.229.000,00.
- Transfer Keluar sebesar Rp23.729.535.998,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp15.698.890.998,00 dan Balilatfo sebesar Rp8.030.645.000,00.
 - Hibah Keluar sebesar Rp1.197.678.750,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp1.110.460.107,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp87.218.643,00.
 - Reklasifikasi sebesar Rp309.877.252.262,00 terdapat pada satker Ditjen PDT sebesar Rp8.682.342.200,00; Ditjen PKP2Trans sebesar Rp300.784.026.062,00; serta Balilatfo sebesar Rp410.884.000,00.
 - Usulan barang hibah DK/TP sebesar Rp62.819.750.098,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp35.212.872.583,00 dan Satker Ditjen PKTrans sebesar Rp27.606.877.515,00.
 - Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp2.288.605.220,00 terdapat pada Ditjen PKTrans sebesar Rp33.000.000,00; Balilatfo sebesar Rp1.018.631.220,00; serta Setjen sebesar Rp1.236.974.000,00.
 - Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp7.696.390.513,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp150.000.000,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp1.225.950.000,00; Balilatfo sebesar Rp5.827.180.713,00; serta Setjen sebesar Rp493.259.800,00.
 - Koreksi Kesalahan Input IP pada Balilatfo sebesar Rp1.420.361.000,00.
 - Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp1.440.234.336,00 terdapat pada Balilatfo sebesar Rp1.095.966.036,00 dan Setjen sebesar Rp344.268.300,00 serta Koreksi Pencatatan sebesar Rp(813.622.000,00) terdapat pada Ditjen PKTrans sebesar Rp(41.015.000,00) dan Balilatfo sebesar Rp(772.607.000,00).

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp732.005.217.423,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp732.005.217.423,00 dan Rp965.108.724.575,00. Terdapat penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2018 sebesar Rp233.103.507.152,00 atau 24,15 persen.

Perbandingan rincian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian DPDTT Per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada berikut.

*Rincian Aset Tetap JIJ per eselon 1
Per 31 Desember 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.03	Ditjen PPMD	6.641.907.450	6.641.907.450	0	0,00%
067.07	Ditjen PKP2Trans	370.970.356.538	422.924.332.131	(51.953.975.593)	-12,28%
067.08	Ditjen PKTRans	342.399.371.351	521.904.689.510	(179.505.318.159)	-34,39%
067.09	Balilatfo	10.118.058.256	9.564.820.746	553.237.510	5,78%
067.10	Setjen	376.998.000	226.717.000	150.281.000	66,29%
Koreksi Atas Revaluasi		1.498.525.828	3.846.257.738	(2.347.731.910)	-61,04%
JUMLAH		732.005.217.423	965.108.724.575	(233.103.507.152)	-24,15%

Terdapat Koreksi atas Revaluasi pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.498.525.828,00 berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor NK-067/54/TO-REVALBMN/2019 Tanggal 21 Februari 2019. Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode TA 2018*

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal	965.108.724.575
Mutasi tambah:	435.864.987.563
Transfer Masuk	277.386.540.084
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	142.959.051.331
Reklasifikasi Masuk	3.228.837.610
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.878.741.000
Pengembangan Nilai Aset	199.500.000
Pengembangan Melalui KDP	3.477.489.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.570.223.500
Saldo Awal	1.999.990.000
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	377.200.000
Pembatalan Penghapusan	1.781.676.738
Mutasi kurang:	(668.968.494.715)
Transfer Keluar	(39.540.059.688)
Penghentian Aset dari Pengguna	(238.851.698.698)
Usulan Barang Hibah DK/TP	(335.793.472.343)
Hibah (Keluar)	(45.576.559.348)
Reklasifikasi Keluar	(2.443.402.800)
Koreksi Pencatatan	(2.911.305.800)
Koreksi Revaluasi Aset Tahun 2017	(3.846.257.738)
Saldo per 31 Desember 2018	732.005.217.423
Akumulasi Penyusutan	190.165.972.058
Nilai Buku per 31 Desember 2018	541.839.245.365

Nilai penurunan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Neraca sebesar Rp233.103.507.152,00, sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp152.995.411.485,00. Hal ini disebabkan karena adanya Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak menambah Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp22.574.795.266,00; Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.365.165.310,00 (Ditjen PKTrans dan Ditjen PKP2Trans); serta Adanya Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp197.340.000,00 (Sekretariat Jenderal).

- Mutasi tambah yang berasal dari Transfer Masuk sebesar Rp277.386.540.084,00 yang terdapat pada Ditjen PDT sebesar Rp8.400.551.700,00; Ditjen

PKP2Trans sebesar Rp273.121.709.884,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp2.567.714.550,00; serta Balilatfo sebesar Rp856.563.950,00.

- Mutasi Tambah Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp142.959.051.331 berasal dari Ditjen PKP2Trans sebesar Rp55.747.280.524,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp86.544.246.807,00; serta Balilatfo sebesar Rp470.184.000,00; serta Sekretariat Jenderal sebesar Rp197.340.000,00.
- Reklasifikasi sebesar Rp785.434.810,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans.
- Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp1.878.741.000,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp1.464.695.000,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp414.046.000,00.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp199.500.000,00 dan Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp3.477.489.000,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans.
- Barang Berlebih Hasil Inventarisasi sebesar Rp377.200.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans.
- Mutasi Kurang berupa Transfer Keluar sebesar Rp39.540.059.688,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp37.114.389.738,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp1.569.106.000,00; serta Balilatfo sebesar Rp856.563.950,00.
- Penghentian Aset dari Pengguna sebesar Rp238.851.698.698,00 terdapat pada Ditjen PDT sebesar Rp840.551.700,00; Ditjen PKP2Trans sebesar Rp236.007.320.146,00; serta Ditjen PKTrans sebesar Rp2.003.826.852,00.
- Mutasi kurang berupa Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar Rp335.793.472.343,00 yang terdapat pada masing-masing unit kerja Eselon I pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp109.589.565.523,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp226.203.906.820,00.

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp159.755.240.972,00-

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp159.755.240.972,00 dan Rp212.537.171.053,00. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Lainnya pada TA 2018 sebesar Rp.52.781.930.081,00 atau 24,82 persen dari tahun 2017. Perbandingan rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian DPDTT Per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada berikut.

*Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Dec-18	31-Dec-17	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	49,875,000	49,875,000	0	0.00%
067.03	Ditjen PPMD	4,645,054,454	446,003,690	4,199,050,764	90.40%
067.04	Ditjen PKP	466,516,450	466,516,450	0	0.00%
067.06	Ditjen PDT	1,878,310,000	1,878,310,000	0	0.00%
067.07	Ditjen PKP2Trans	16,303,401,000	36,160,112,000	(19,856,711,000)	-121.79%
067.08	Ditjen PKTRans	133,200,758,145	148,313,119,949	(15,112,361,804)	-11.35%
067.09	Balilafro	647,924,923	1,072,546,123	(424,621,200)	-65.54%
067.10	Setjen	2,563,401,000	24,150,687,841	(21,587,286,841)	-842.13%
JUMLAH		159,755,240,972	212,537,171,053	(52,781,930,081)	-33.04%

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya
Periode TA 2018*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI
Saldo Awal	212.537.171.053
Mutasi tambah:	50.690.065.068
Transfer Masuk	19.306.668.245
Pembelian	1.950.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	25.973.965.059
Penyelesaian Pembangunan Langsung	5.407.481.764
Mutasi kurang:	(103.471.995.149)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(20.223.000)
Reklasifikasi Keluar	(1.605.430.578)
Hibah (Keluar)	(2.326.006.000)
Transfer Keluar	(4.097.443.978)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(18.579.615.948)
Koreksi Pencatatan	(23.273.451.841)
Usulan Barang Hibah DK/TP	(53.145.423.804)
Penghapusan	(424.400.000)
Saldo per 31 Desember 2018	159.755.240.972
Akumulasi Penyusutan	(14.323.842.768)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	145.431.666.204

Nilai penurunan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Neraca sebesar Rp.52.781.930.081,00, sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat nilai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp790.046.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak menambah Aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp244.480.000,00 (Ditjen PDTu, Sekretariat Jenderal, dan Balilatfo); Adanya perolehan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Modal JIJ sebesar Rp18.022.009.000,00 (Ditjen PKTrans); Adanya perolehan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.257.406.342,00 (Ditjen PPMD, Ditjen PKTrans, dan Sekretariat Jenderal); serta Adanya perolehan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.169.245.000,00 (Sekretariat Jenderal).

- Mutasi tambah berupa Transfer Masuk sebesar Rp19.306.668.245,00 terdapat pada satker Ditjen PKP2Trans sebesar Rp14.944.022.527,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp2.896.339.140,00; serta Balilatfo sebesar Rp1.466.306.578,00.
- Mutasi tambah berupa Pembelian senilai Rp1.950.000,00 yang berasal dari Ditjen PKTrans. Transfer Masuk senilai Rp19.306.668.245,00 terdapat pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp14.944.022.527,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp2.896.339.140,00; serta Balilatfo sebesar Rp1.466.306.578,00.
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp25.973.965.059,00 terdapat pada satker Ditjen PKTrans sebesar Rp22.894.831.481,00 dan Setjen sebesar Rp3.079.133.578,00; serta Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp5.407.481.764,00 terdapat pada Ditjen PKTrans.
- Mutasi Keluar Hibah Keluar berupa Reklasifikasi Dari

Aset Tetap Ke Aset Lainnya (penghentian aset dari pengguna) senilai Rp18.579.615.948 terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp14.534.241.127,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp4.045.153.621,00; serta Balilatfo sebesar Rp221.200,00. Usulan Barang Hibah DK/TP senilai Rp53.145.423.804 terdapat pada Ditjen PKTrans sebesar Rp19.644.249.000,00 dan Ditjen Pktrans sebesar Rp33.501.174.804,00.

- Mutasi Keluar berupa Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.605.430.578,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp212.462.000,00 dan Balilatfo sebesar Rp1.392.968.578,00.
- Mutasi Keluar berupa Transfer Keluar sebesar Rp4.097.443.978,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp409.781.400,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp2.221.356.000,00; Balilatfo sebesar Rp73.338.000,00; serta Setjen sebesar Rp1.392.968.578,00.
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp(20.223.000,00) terdapat pada Ditjen PKTrans serta Koreksi Pencatatan sebesar Rp(23.273.451.841,00) terdapat pada Setjen.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Penghentian Aset dari Pengguna) sebesar Rp18.579.615.948,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp14.534.241.127,00; Ditjen PKTrans sebesar Rp4.045.153.621,00; serta Balilatfo sebesar Rp221.200,00.
- Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar Rp53.145.423.804,00 terdapat pada satker Ditjen PKTrans sebesar Rp33.501.174.804,00 dan Ditjen PKP2Trans sebesar Rp19.644.249.000,00.
- Penghapusan sebesar Rp424.400.000,00 terdapat pada satker Balilatfo.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat Aset

Tetap Renovasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp158.172.680.168,00 dengan rincian per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Renovasi per Unit Kerja Eselon I
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Nama UKE 1	Jumlah
067.03	Ditjen PPMD	4.645.054.454
067.04	Ditjen PKP	466.516.450
067.06	Ditjen PDT	1.878.310.000
067.07	Ditjen PKP2Trans	16.106.081.600
067.08	Ditjen PKTrans	133.060.568.620
067.09	Balilatfo	329.984.044
067.10	Setjen	1.686.165.000
	Total	158.172.680.168

- Aset Tetap Renovasi Ditjen PKP per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp466.516.450,00 merupakan renovasi gedung/bangunan Tahun 2016 yang digunakan oleh Ditjen PKP. Aset tersebut merupakan milik Kementerian Dalam Negeri yang digunakan oleh Ditjen PKP sesuai dengan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/4812/SJ Tanggal 26 Agustus 2015 kepada Sekretariat Jenderal KDPDPTT perihal Penggunaan Gedung Kantor Eks. Ditjen Dukcapil Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, sedangkan alih status Bangunan/ Gedung tersebut dari Kementerian Dalam Negeri ke KDPDPTT masih dalam proses.
- Aset Tetap Renovasi Ditjen PPMD per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.645.054.454,00. Aset Induk Aset Tetap dalam Renovasi merupakan milik Kementerian Dalam Negeri. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat dari Sekretariat Jenderal KDPDPTT Nomor. 260/SJ-KDPDPTT/03/2017 Tanggal 3 Maret 2017 perihal pemanfaatan dan Penggunaan Ruang Kerja untuk memperoleh kejelasan status penggunaan Aset Induk atau Pengakuan dari saldo Aset Tetap Renovasi di Neraca per 31

Desember 2017. Kemudian Surat dari Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor. 028/1813/SJ Tanggal 22 Maret 2018 perihal Permohonan Penggunaan Sementara BMN Kepada Kementerian Keuangan dan telah mendapat surat balasan dengan Nomor Surat S-24/MK.6/WKN.07/2018 pada Tanggal 18 April 2018 perihal Persetujuan Penggunaan Sementara BMN pada KDPDTT dengan rincian Aset Tetap Renovasi sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Kamar Mandi Ditjen PPMD sebesar Rp198.122.375,00 yang dilaksanakan tahun 2015
 - b. Pekerjaan Septictank sebesar Rp144.957.175,00 yang dilaksanakan tahun 2015
 - c. Rehabilitasi Ruang Kerja Bagian Perencanaan Ditjen PPMD sebesar Rp43.420.740,00 yang dilaksanakan tahun 2016
 - d. Rehabilitasi Ruang Kerja Lantai 2 Ditjen PPMD sebesar Rp18.143.400,00 yang dilaksanakan tahun 2016
 - e. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar Rp41.360.000,00 yang dilaksanakan tahun 2017
 - f. Rehabilitasi Toilet dan Pantry Ditjen PPMD sebesar Rp195.365.764,00 yang dilaksanakan tahun 2018
 - g. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar Rp49.675.000,00 yang dilaksanakan tahun 2018
 - h. Pengawasan Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar Rp49.665.000,00 yang dilaksanakan tahun 2018
 - i. Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar Rp3.904.345.000,00 yang dilaksanakan tahun 2018
- Aset Tetap Renovasi Ditjen PDT per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.878.310.000,00 merupakan pekerjaan renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp1.596.000.000,00 yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Sekretariat Negara yang dipakai untuk pelaksanaan pemerintahan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta

pekerjaan perencanaan dan pengawasannya sebesar Rp84.560.000,00 dan adanya penambahan Aset Tetap Renovasi pada Ditjen PDT merupakan renovasi ruang tunggu tamu menjadi cafeteria. Pengerjaan renovasi tersebut sesuai dengan kontrak No. 019/SPK/SATKER-PPK.I/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dengan nilai kontrak Rp197.750.000. Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap dalam Renovasi Gedung yang saat ini sedang diproses pelaporan atas renovasi gedung kepada Sekretariat Negara.

- Aset Tetap Renovasi pada Ditjen PKP2Trans senilai Rp184.583.300,00 berasal dari Satker Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat (Perolehan tahun 2016) yang merupakan Gedung dan Bangunan, kemudian sebesar Rp15.921.498.300,00 berasal Satker Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Capil Kabupaten Takalar (Perolehan tahun 2014) serta Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toli-Toli (Perolehan tahun 2017) merupakan Jalan, Irigrasi, dan Jembatan.
- Aset Tetap Lainnya pada Ditjen PKTrans senilai Rp133.060.568.620,00 yang merupakan Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.387.956.599,00, Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp98.964.426.664,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.708.185.357,00. Adapun rincian Aset Tetap Renovasi per Satker pada Ditjen PKTrans dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Renovasi per Satker
Ditjen PKTrans Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
1	067.08.350140	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. ACEH BARAT	470.120.000,00
2	067.08.350155	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SAROLANGUN	64.620.000,00
3	067.08.350165	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	108.200.000,00
4	067.08.350166	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN	353.466.000,00
5	067.08.350171	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR	12.584.217.368,00
6	067.08.350182	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG	534.750.000,00
7	067.08.350215	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO TIMUR	1.027.345.200,00
8	067.08.350216	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	713.242.099,00
9	067.08.350220	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KATINGAN	7.183.457.774,00
10	067.08.350223	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GUNUNG MAS	5.840.224.000,00
11	067.08.350225	DINAS TRANSMIGRASI KAB. KAPUAS	8.272.790.000,00
12	067.08.350252	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KUTAI TIMUR	459.265.000,00
13	067.08.350253	DINAS TENAGA KERJA, PERINDAKOP, DAN TRANSMIGRASI KAB. TANA TIDUNG	58.046.000,00
14	067.08.350255	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MINAHASA SELATAN	1.907.800.000,00
18	067.08.350270	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL	5.826.432.000,00
19	067.08.350276	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MOROWALI	809.885.000,00
20	067.08.350283	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PINRANG	5.116.809.000,00
21	067.08.350286	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. TANA TORAJA	5.108.497.000,00
22	067.08.350287	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU UTARA	19.000.000,00
23	067.08.350291	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB. LUWU TIMUR	572.562.600,00
24	067.08.350293	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TORAJA UTARA	164.604.000,00
25	067.08.350305	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONAWE SELATAN	8.053.690.600,00
26	067.08.350338	DINAS NAKER DAN TRANS KAB. SUMBAWA	6.029.069.242,00
27	067.08.350389	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKULU SELATAN	6.297.436.600,00
28	067.08.350394	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA SELATAN	2.644.190.000,00
29	067.08.350395	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR	158.300.000,00
30	067.08.350397	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB PULAU MOROTAI	4.206.145.000,00
31	067.08.350418	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO	1.944.880.000,00
32	067.08.350420	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BOALEMO	2.854.803.000,00
33	067.08.350423	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO UTARA	3.382.765.000,00
34	067.08.350433	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN FAK-FAK	1.379.636.000,00
35	067.08.350457	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	614.236.000,00
36	067.08.350458	SEKRETARIAT DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	30.006.798.137,00
37	067.08.350466	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN	175.066.000,00
38	067.08.419031	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKAYANG	8.072.859.000,00
39	067.08.419133	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MJNA BARAT	45.361.000,00
TOTAL			133.060.568.620,00

- Aset Tetap Renovasi Balilaf to per 31 Desember 2018 sebesar Rp329.984.044,- adalah renovasi gedung Balai Besar Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Jakarta milik instansi Kementerian Ketenagakerjaan RI, sudah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal KDPDTT dengan mengajukan permohonan penyerahan Aset Tetap dalam

Renovasi kepada Sekretariat Jenderal KDPDTT melalui surat Nomor: 686/SJ-KDPDTT/05/2017 Tanggal 17 Mei 2017, pada tanggal pelaporan masih dalam proses penyelesaian.

- Aset tetap renovasi Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2018 sebesar terdapat penambahan sebesar Rp1.686.165.000,00 yakni berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp516.920.000,00 dan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.169.245.000,00. Aset induk dari Aset Tetap dalam Renovasi merupakan milik Sekretariat Negara.

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp11.181.884.170,00

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp11.181.884.170,00 dan Rp24.495.714.219,00. Terdapat penurunan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2018 sebesar Rp13.313.830.049,00 atau 54,35 persen.

Perbandingan rincian nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian DPDTT Per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada berikut:

*Rincian Aset Tetap KDP per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.07	Ditjen PKP2TRans	3.114.414.909	2.741.157.904	373.257.005	13,62%
067.08	Ditjen PKTRans	8.067.469.261	21.754.556.315	(13.687.087.054)	-62,92%
JUMLAH		11.181.884.170	24.495.714.219	(13.313.830.049)	-54,35%

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Periode TA 2018*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI
Saldo Awal	24.495.714.219
Mutasi tambah:	224.570.044.113
Pengembangan KDP	162.524.331.641
Perolehan/Penambahan KDP	60.545.692.249
Transfer Masuk KDP	1.216.145.839
Koreksi Nilai KDP	283.874.384
Mutasi kurang:	237.883.874.162
Penghapusan/ Penghentian KDP	320.401.360
Hibah Keluar KDP	1.053.861.532
Transfer Keluar KDP	1.216.145.839
Pengembangan Melalui KDP	11.173.879.513
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	224.119.585.918
Saldo Akhir	11.181.884.170

Terdapat KDP pada Laporan Keuangan Kemendesa PDTT dengan uraian sebagai berikut:

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi senilai Rp8.067.469.261,00 dengan penjelasan pada per satuan kerja sebagai berikut :

1. Disnakertrans Kab. Bengkulu Utara sebesar Rp1.136.737.000,00 pada KTM Lagita untuk kegiatan pembangunan Islamic Center berupa Masjid Tahap I dan Tahap II masih akan dilanjutkan di Tahun 2019. Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut :

- Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan No. Kontrak 475/1074/KONTRAK-APBN/X/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.094.781.000,00 dengan rincian pembayaran :
 - 100% Supervisi sebesar Rp31.156.000,00
 - 30% Uang Muka sebesar Rp328.434.300,00

- 35% Termin I sebesar Rp383.173.350,00
 - 35% Termin II sebesar Rp383.173.350,00
 - Perjadin Monev sebesar Rp7.200.000,00 dan sebesar Rp3.600.000,00 sebagai biaya untuk mendukung pekerjaan pembangunan Islamic Center.
2. Disnakertrans Provinsi Bengkulu sebesar Rp702.612.351,00 pada UPT. Bukit Merbau SP. 2 Kabupaten Rejang Lebong untuk kegiatan rehabilitasi jalan penghubung/poros. KDP terjadi dikarenakan adanya Wan Prestasi oleh Pihak Ketiga yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut :
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan No. Kontrak 449/DKKTRANS-08/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp968.292.887,00 dengan rincian pembayaran :
- 66% Supervisi sebesar Rp58.796.000,00
 - 30% Uang Muka sebesar Rp290.487.865,00
 - 36% Termin I sebesar Rp353.329.486,00
3. Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan sebesar Rp2.802.594.000,00. KDP terjadi dikarenakan adanya Wan Prestasi. Karena Pihak Ketiga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya yang merupakan perolehan di Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut :
- Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan No. Kontrak 051/SPK/PKT/DTT-HS/III/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.782.000,00 untuk pekerjaan supervise Rehap Fasilitas umum (Fasum) pada UPT. Fida SP.6

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan No. Kontrak 595/185/SP/Nakertrans/X/2015 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Nilai Kontrak sebesar Rp538.950.000,00 . Realisasi Uang Muka 30% dan Supervisi sebesar Rp226.025.000,00 untuk rehap jembatan pada UPT. Fida SP.6
 - Nilai Kontrak sebesar Rp377.265.000,00 (Termin 70%) untuk rehap jembatan pada UPT. Fida SP.6
- Aset Tetap Lainnya dalam pengerjaan No. Kontrak 595/187/SP/2012 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Nilai Kontrak sebesar Rp3.259.400.000,00 (Termin 65%) untuk pembangunan jembatan tiang pancang.
 - Nilai Kontrak sebesar Rp126.100.000,00 (Supervisi) untuk pembangunan jembatan tiang pancang.
- 4. Dinsosnakertrans Kab. Bengkayang sebesar Rp3.425.525.910,00 pada UPT. Capkala untuk pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung. KDP dikarenakan adanya Wan Prestasi oleh Pihak Ketiga yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan No. Kontrak 2-X/SPK/KSupr/DINKOPNAKERTRANS dengan nilai kontrak sebesar Rp99.630.000,00 untuk pekerjaan supervise jalan poros penghubung lokasi Desa Aris Kecamatan Capkala dengan rincian pembayaran :
 - 30% Supervisi Termin I sebesar

Rp29.889.000,00

- 56% Supervisi Termin II sebesar Rp25.903.800,00
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan No. Kontrak 595/01/sp/dinkopnakertrans/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.357.987.000,00 untuk pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung (5.8 km) lokasi Kecamatan Capkala dengan rincian pembayaran :
 - 20% Uang Muka sebesar Rp1.217.597.400,00
 - 40% Termin I sebesar Rp1.716.656.490,00
 - 6% Termin II sebesar Rp381.479.220,00

2. Aset KDP Ditjen PKP2Trans per 31 Desember 2018 senilai Rp3.114.414.909,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:

Kode Satker Th 2018	Uraian Satker	URAIAN KDP	NILAI KDP	KETERANGAN
350122	Dinas Nakertrans Kab. Aceh Selatan	Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan	1.142.974.765	Satker Tidak Aktif dari Tahun 2017 sampai dengan saat ini
451377	Dinas Nakertrans Kab. Lima Puluh Kota	Tanah dalam pengerjaan, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan	1.169.402.839	Satker Tidak Aktif dari Tahun 2014 sampai dengan saat ini
350279	Dinas Nakertrans Kab. Takalar	Jalan Irigasi dan Jaringan	202.805.000	Satker Tidak Aktif dari Tahun 2017 sampai dengan saat ini
419114 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Manokwari Selatan	Jalan Irigasi dan Jaringan	420.000.005	Satker Tidak Aktif dari Tahun 2019
419104	Dinas Nakertrans Kab. Bolaang Mongondow Timur	Jalan Irigasi dan Jaringan	179.232.300	Satker Tidak Aktif dari Tahun 2017 sampai dengan saat ini
Jumlah			3.114.414.909	

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp473.346.305.999,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp473.346.305.999,00) dan (Rp486.410.461.843,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	344,347,161,374	229,816,758,575	114,530,402,799
2	Gedung dan Bangunan	329,194,678,847	39,039,732,598	290,154,946,249
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	732,005,217,423	190,165,972,058	541,839,245,365
4	Aset Tetap Lainnya	159,755,240,972	14,323,842,768	145,431,398,204
Jumlah		1,565,302,298,616	473,346,305,999	1,091,955,992,617

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Piutang
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
Rp19.541.286,00*

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp19.541.286,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan tuntutan ganti rugi berupa motor hilang pada Pusat Pendidikan ASN oleh Anisya Kusumawati (Honda Vario) dan Roida Silalahi (Honda Supra). Adapun bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak terlampir.

*Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.09	Balilatto	19.541.286	0	19.541.286	100%
JUMLAH		19.541.286	0	19.541.286	100%

C.18 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp7.854.215.654,00*

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp7.854.215.654,00 dan Rp7.775.495.654,00. Aset Tak

Berwujud mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp78.720.000,00 atau 1,01 persen.

Rincian Aset Tak Berwujud Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 dan 2017 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Kerja Eselon I
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.05	Ditjen PDTu	852.370.000	714.190.000	138.180.000	19,35%
067.08	Ditjen PKTRans	1.674.194.000	1.773.654.000	(99.460.000)	-5,61%
067.09	Balilatfo	3.570.241.654	3.570.241.654	0	0,00%
067.10	Setjen	1.757.410.000	1.717.410.000	40.000.000	2,33%
JUMLAH		7.854.215.654	7.775.495.654	78.720.000	1,01%

Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud
Berdasarkan Jenisnya TA 2018*

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	6.292.779.904
2	ATB Lainnya	1.561.435.750
Jumlah		7.854.215.654

Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.854.215.654,00 menurut jenisnya pada Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I
Per 31 Desember 2018*

(Dalam Rupiah)

No	Eselon 1	ATB Software	ATB Lainnya	Jumlah
1	Ditjen PDTu	852.370.000		852.370.000
2	Ditjen PKTrans	1.062.404.000	611.790.000	1.674.194.000
3	Balilatfo	2.999.595.904	570.645.750	3.570.241.654
4	Setjen	1.378.410.000	379.000.000	1.717.410.000
Jumlah		6.292.779.904	1.561.435.750	7.854.215.654

Mutasi Aset Tak Berwujud tahun 2018 adalah sebagai berikut:

*Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI
Saldo Awal	7.775.495.654
Mutasi tambah:	3.429.721.654
Transfer Masuk	3.251.541.654
Pembelian	178.180.000
Mutasi kurang:	(3.351.001.654)
Transfer Keluar	(3.251.541.654)
Usulan Barang Hibah DK/TP	(99.460.000)
Saldo per 31 Desember 2018	7.854.215.654
Amortisasi	(4.167.482.042)
Saldo Buku per 31 Desember 2018	3.686.733.612

- Mutasi Tambah berasal dari Transfer Masuk pada satker Balilatfo sebesar Rp3.251.541.654,00 yang berupa software sebesar Rp2.748.395.904,00 dan ATB Lainnya sebesar Rp503.145.750,00.
- Mutasi tambah berasal dari Pembelian yang berasal dari Ditjen PDTU sebesar Rp138.180.000,00 dan Sekretariat Jenderal sebesar Rp40.000.000,- berupa software komputer.
- Mutasi Keluar berupa Transfer Keluar sebesar Rp3.251.541.654,00 berasal dari Balilatfo pada Satker Pusat Data dan Informasi sebesar Rp2.717.395.904,00 dan Pusat Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp31.000.000,00 serta Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp503.145.750,00 yang berasal dari Satker Pusat Data dan Informasi.
- Mutasi keluar berasal dari Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar Rp99.460.000,00 berasal dari Ditjen PKTrans satker Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur (350349).

C.19 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp1.994.248.710.782,00*

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp1.994.248.710.782,00 dan Rp2.501.523.762.400,00. Aset Lain-lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta

dalam proses penghapusan dari BMN. Terdapat penurunan nilai Aset Lain- Lain pada TA 2018 sebesar Rp507.275.051.618,00 atau 20,28 persen.

Perbandingan rincian nilai Aset Lain- Lain yang dimiliki Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian DPDTT Per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada berikut.

*Rincian Aset Lain- Lain per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.04	Ditjen PKP	36.678.666.130	245.050.913.841	(208.372.247.711)	-85,03%
067.05	Ditjen PDTu	293.588.956.393	373.204.505.920	(79.615.549.527)	-21,33%
067.06	Ditjen PDT	448.146.111.799	448.146.111.799	0	0,00%
067.07	Ditjen PKP2TRans	931.601.599.381	1.090.850.757.231	(159.249.157.850)	-14,60%
067.08	Ditjen PKTRans	233.838.656.763	304.708.342.449	(70.869.685.686)	-23,26%
067.09	Balilatfo	6.532.403.326	6.174.148.906	358.254.420	5,80%
067.10	Setjen	43.862.316.990	33.388.982.254	10.473.334.736	31,37%
JUMLAH		1.994.248.710.782	2.501.523.762.400	(507.275.051.618)	-20,28%

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Lain- Lain pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Aset Lain- Lain
Periode TA 2018*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2017	2.501.523.762.400
Mutasi Tambah:	637.508.643.509
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	637.508.643.509
Mutasi Kurang:	(1.144.783.695.127)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(6.960.000)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(135.294.480)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(229.800.000)
Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)	(234.487.272.319)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(290.916.661.020)
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(619.007.707.308)
Saldo per 31 Desember 2018	1.994.248.710.782
Akumulasi Penyusutan	889.622.125.693
Saldo per 31 Desember 2018	1.104.626.585.089

Mutasi Tambah berasal dari:

a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

- Dirjen PDT Sebesar Rp15.304.673.150,00
- Dirjen PKP2Trans Sebesar Rp597.823.497.662,00
- Dirjen PKTrans Sebesar Rp6.423.238.723,00
- Balilatfo Sebesar Rp5.839.497.194,00
- Setjen Sebesar Rp12.117.736.780,00

Mutasi kurang berasal dari:

a. Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)

berasal dari Dirjen PKP2Trans Sebesar Rp6.960.000,00

b. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Berasal dari

Balilatfo sebesar Rp120.060.000,00 dan dari Setjen sebesar Rp15.234.480,00

c. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)

Berasal dari Balilatfo sebesar Rp229.800.000,00

d. Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)

berasal dari Dirjen PKP2Trans sebesar Rp159.242.197.850,00 dan dari Dirjen PKTrans sebesar Rp75.245.074.469,00

e. Penghapusan (BMN yang dihentikan)

- Dirjen PKP sebesar Rp208.372.247.711,00
- Dirjen PDTu sebesar Rp79.615.549.527,00
- Dirjen PKP2Trans sebesar Rp696.700.000,00
- Balilatfo sebesar Rp602.996.218,00
- Setjen sebesar Rp1.396.137.564,00
- Terdapat tambahan BMN yang dihentikan pada Sekretariat Jenderal sesuai dengan rekomendasi dari BPK sebesar Rp233.030.000,00 (Bappeda Prov. NAD). Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor: 117 Tahun 2018 (SK penghapusan terlampir).

f. Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)

- Dirjen PDT sebesar Rp15.304.673.150,00
- Dirjen PKP2Trans sebesar Rp597.126.797.662,00

- Dirjen PKPTrans sebesar Rp2.047.849.940,00
- Balilatfo sebesar Rp4.528.386.556,00

Terdapat barang yang hilang berupa Alat Angkutan Darat Bermotor yang termasuk ke dalam Peralatan dan Mesin sebesar Rp388.395.500,00 yang ada di Ditjen PKP2Trans. Barang rusak berat sebesar Rp229.800.000,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor yang ada di Balilatfo dan Rp(1.182.000,00) berupa Alat Bengkel Tak Bermesin yang ada di Setjen dalam bentuk cermin besar dengan nomor 3.30.02.11.008 sebanyak 2 buah seharga Rp630.000,00 dan 552.000,00. Angka minus terjadi karena adanya *double* pencatatan penghapusan.

Persediaan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda yang terdapat di aset lain-lain terlampir.

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp893.789.607
.735,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp893.789.607.735,00) dan (Rp967.209.424.954,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	ATB Software Kompu	6.292.779.904	(4.167.482.042)	2.125.297.862
2	ATB Lainnya	1.561.435.750	-	1.561.435.750
	Jumlah	7.854.215.654	(4.167.482.042)	3.686.733.612
3	Aset Lain-lain	1.994.248.710.782	(889.622.125.693)	1.104.626.585.089
	Jumlah	2.002.102.926.436	(893.789.607.735)	1.108.313.318.701

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp4.357.312.14
9,00*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.357.312.149,00 dan Rp6.611.032.907,00. Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 sebesar Rp4.357.312.149,00 terdapat pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Utang kepada

Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian utang kepada pihak ketiga terlampir.

C.22 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp16.831.000,00.

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16.831.000,00 dan Rp18.938.471,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 per satker dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian uang Muka dari KPPN per Unit Eselon 1
Per 31 Desember 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Nama Satker	Jumlah
067.07	DIREKTORAT JENDRAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN	10.781.000
067.09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN SERTA INFOMASI	6.050.000
JUMLAH		16.831.000

C.23 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.182.408,00.

C.24 Ekuitas

Ekuitas
Rp2.911.334.247.645,00

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.911.334.247.645,00 dan Rp3.434.655.232.448,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan-LO**

Pendapatan
Rp5.300.549.997,00

Jumlah Pendapatan-LO pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.300.549.997,00 dan Rp2.396.995.596,00.

Rincian Pendapatan-LO Tahun 2018 per jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan-LO per jenis pendapatan
Per 31 Desember 2018*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Nilai
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	542.063.595,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.456.000.000,00
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	308.951,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	13.332.807,00
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	50.322,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.288.787.100,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	7.222,00
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2018		5.300.549.997,00

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119) sebesar Rp542.063.595,00 berasal dari Balilaf di satuan kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (350480).

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp1.456.000.000,00 merupakan sewa Gedung Makarti yang terdapat pada Setjen.

Pendapatan Bunga Lainnya (425719) sebesar Rp308.951,00 merupakan bunga bank yang dikembalikan ke Kas Negara yang terdapat pada Direktorat Jenderal PPMD di Satuan Kerja Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Melawi (350210).

Pendapatan dari Penutupan Rekening sebesar Rp50.322,00 berasal dari Balilaf.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

sebesar Rp3.288.787.100,00 yang berasal Ditjen PPMD sebesar Rp124.732.051,00, Ditjen PKP sebesar Rp838.088.149,00, Ditjen PDTu sebesar Rp1.236.672.221,00, Ditjen PDT sebesar Rp508.263.221,00, Ditjen PKP2Trans sebesar Rp317.581.064,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp251.028.125,00, dan Balilatfo sebesar Rp12.422.116,00.

Pendapatan Anggaran Lainnya sebesar Rp.7.222,00 yang berasal dari Ditjen PPMD sebesar Rp5.000,00 dan yang berasal dari Ditjen PKTrans sebesar Rp2.222,00 yang merupakan potongan sewa rumah tunggakan utang lebih potongan lain Taperum.

Adapun Rincian Pendapatan-LO Tahun 2018 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan-LO per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31-Des-18	31-Des-17
067.02	Itjen	-	43
067.03	Ditjen PPMD	138.310.872	196.006.191
067.04	Ditjen PKP	838.088.149	156.387.921
067.05	DitjenPDTu	1.236.672.374	62.563.815
067.06	Ditjen PDT	508.284.524	121.564
067.07	Ditjen PKP2Trans	317.612.763	42.505.812
067.08	Ditjen PKTRans	251.045.282	27.137.830
067.09	Balilatfo	554.536.033	560.284.715
067.10	Setjen	1.456.000.000	1.351.987.705
JUMLAH		5.300.549.997	2.396.995.596

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp214.433.233.
366,00*

Beban Pegawai untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp214.433.233.366,00 dan Rp208.337.577.246,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017 per jenis Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian jenis Beban Pegawai
TA 2018 dan TA 2017*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
511111	Beban Gaji Pokok PNS	81.914.666.720	82.668.910.773
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(1.095.600)	(53.107.500)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.122.963	1.086.409
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(17.235)	(7.186)
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	(7.702.740)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	5.914.249.364	5.594.371.214
511122	Beban Tunj. Anak PNS	1.426.947.692	1.334.714.807
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(172.000)	-
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	10.110.512.450	8.934.660.000
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(21.076.276)	(19.500.000)
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(24.120.000)	(2.405.000)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.859.200.000	2.688.985.000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	525.807.180	566.257.340
511126	Beban Tunj. Beras PNS	3.758.953.560	3.770.817.950
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS	40.825.000	-
511128	Beban Tunj. Lauk Pauk PNS	12.920.000	-
511129	Beban Uang Makan PNS	10.227.806.891	10.581.546.400
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(142.450)	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1.967.355.000	8.120.603.410
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(43.255.000)	(522.704.572)
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	183.750.000	183.750.000
512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	(26.231.910)	(6.192.950)
512211	Beban Uang Lembur	4.240.446.324	14.746.387.384
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(48.416.926)	(975.638.605)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	91.413.197.619	70.732.745.112
JUMLAH		214.433.233.366	208.337.577.246

Jumlah beban pegawai pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kemandesa, PDT, dan Transmigrasi dari 47% menjadi 60% pada tahun 2018, serta kenaikan belanja gaji dan tunjangan PNS akibat penambahan pegawai pada tahun 2018.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017 menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Pegawai per Unit Kerja Eselon I
TA 2018 dan TA 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.02	Inspektorat Jenderal	11.737.263.450	15.930.063.451
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	17.836.324.796	9.747.376.617
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	15.148.063.907	13.806.344.893
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	16.126.102.000	13.753.408.686
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	14.388.559.595	13.950.260.441
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	28.432.545.049	31.988.934.435
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	25.603.367.725	25.600.975.917
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	52.184.640.762	48.121.140.614
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	32.976.366.082	35.439.072.192
JUMLAH		214.433.233.366	208.337.577.246

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp29.347.040.093,00*

Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp29.347.040.093,00 dan Rp30.757.714.036,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan menurut Akun pada Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perbandingan Beban Persediaan menurut Akun
TA 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
593111	Beban Persediaan konsumsi	25.964.798.989	30.516.016.210
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	73.140.500	21.914.000
593131	Beban Persediaan bahan baku	15.938.310	46.181.026
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	2.231.793.744	-
593149	Beban Persediaan Lainnya	1.061.368.550	173.602.800
JUMLAH		29.347.040.093	30.757.714.036

Rincian Beban Persediaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I pada Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada

tabel berikut:

*Rincian Perbandingan Beban Persediaan per Unit Kerja
Eselon I TA 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
067.02	Inspektorat Jenderal	2.094.469.801	2.629.802.950
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.459.775.188	3.766.225.270
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	3.473.495.620	3.131.387.712
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	1.605.369.129	1.809.182.750
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	4.153.699.430	4.331.421.190
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	1.841.839.450	1.811.562.719
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	4.646.164.255	3.413.233.893
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	646.665.215	1.350.771.566
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	6.425.562.005	8.514.125.986
JUMLAH		29.347.040.093	30.757.714.036

Terdapat Belanja Barang Pemeliharaan yang menghasilkan Beban Persediaan sebesar Rp15.232.500,00 dari Ditjen PDTu.

Selain dari Belanja Pemeliharaan, terdapat juga Belanja Persediaan yang diserahkan kepada masyarakat (MAK 526) yang menghasilkan beban persediaan sebesar Rp3.174.051.638,00 yang terdiri dari Ditjen PKP2Trans sebesar Rp447.354.850,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp2.726.696.788,00.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
Rp3.180.157.961.801,00*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.180.157.961.801,00 dan Rp2.218.784.029.453,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian beban barang dan jasa per jenis beban tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Akun
TA 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2018	2017
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-	(12.777.622)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	57.429.144.461	41.547.285.728
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	-	-
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	142.066.500	160.763.000
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	649.113.870	752.153.697
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39.491.158.000	38.335.908.430
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(28.150.000)	(50.387.500)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8.439.189.835	13.265.909.150
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(7.390.000)	(124.814.312)
521211	Beban Bahan	124.310.033.229	112.820.867.439
521211	Pengembalian Beban Bahan	(125.543.487)	(13.674.000)
521212	Beban Barang Transito	6.000.000	4.000.000
521213	Beban Honor Output Kegiatan	41.355.816.100	41.997.843.500
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(102.154.000)	(55.579.500)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	463.685.501.368	153.213.670.406
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(4.027.737.841)	(1.766.936.033)
522111	Beban Langganan Listrik	9.514.226.545	7.735.486.856
522112	Beban Langganan Telepon	403.175.603	437.046.157
522113	Beban Langganan Air	610.574.772	424.476.900
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8.245.539.350	5.389.862.365
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	4.591.000	21.290.565
522131	Beban Jasa Konsultan	180.945.379.364	186.431.750.614
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	(142.630.631)	(27.819.000)
522141	Beban Sewa	58.751.047.279	46.153.631.260
522141	Pengembalian Beban Sewa	(159.380.636)	(22.468.182)
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	(245.605.000)	(81.882.858)
522151	Beban Jasa Profesi	46.195.843.643	46.754.716.250
522191	Beban Jasa Lainnya	2.144.253.483.574	1.525.792.475.506
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(58.951.412)	(412.535.163)
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	552.672.315	53.765.800
595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.648.000	-
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	66.300.000	60.000.000
JUMLAH		3.180.157.961.801	2.218.784.029.453

Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa menurut BA atau Eselon 1 Tahun 2018 dan 2017 apat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Eselon I
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.01	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	-	-
067.02	Inspektorat Jenderal	15.502.089.179	13.259.856.264
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.558.917.219.678	1.727.032.724.123
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	75.658.056.157	70.026.625.966
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	36.076.889.351	40.504.676.727
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	49.907.288.622	46.859.804.393
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	69.265.618.351	59.714.532.876
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	77.860.233.403	41.839.658.706
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	109.144.590.336	77.158.258.736
067.10	Sekretariat Jenderal Desa, PDT dan Transmigrasi	187.825.976.724	142.387.891.662
JUMLAH		3.180.157.961.801	2.218.784.029.453

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp34.454.741.640,00

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp34.454.741.640,00 dan Rp37.580.345.894,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2018 menurut akun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Akun
TA 2018*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.507.725.942
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.111.482.100
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.834.811.347
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.902.000
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	456.312.199
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	230.439.600
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	131.995.550
593114	Beban Persediaan suku cadang	8.940.000
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	37.132.902
JUMLAH		34.454.741.640

Sedangkan perbandingan Beban Pemeliharaan menurut BA dan Eselon I Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel

berikut:

*Beban Pemeliharaan per Unit Kerja Eselon I
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.02	Inspektorat Jenderal	464.051.344	648.362.382
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	613.025.389	573.972.430
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.032.119.847	4.876.256.038
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	901.098.230	1.086.724.181
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	731.131.498	328.253.936
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	2.947.113.559	2.973.679.761
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.691.108.875	2.505.762.873
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	8.430.615.889	9.323.607.950
067.10	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN	17.644.477.009	15.263.726.343
JUMLAH		34.454.741.640	37.580.345.894

Terdapat Belanja Konsumsi yang menghasilkan beban pemeliharaan sebesar Rp116.095.800,00 yang terdiri dari Ditjen PPMD sebesar Rp3.475.000,00, Ditjen PDT sebesar Rp280.000,00, Balilafpo sebesar Rp84.027.600,00, dan Setjend sebesar Rp28.313.200,00.

Selain dari belanja konsumsi, terdapat juga belanja Barang Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (MAK 526) yang menghasilkan beban pemeliharaan sebesar Rp1.805.850,00 yang terdiri dari Ditjen PKP2Trans sebesar Rp1.500.000,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp305.850,00.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp755.509.748.
479,00*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp755.509.748.479,00 dan Rp595.672.353.870,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kenaikan beban perjalanan dinas paket meeting dalam dan luar kota, serta

perjalanan dinas luar negeri.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Akun
TA 2018 dan TA 2017*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	TA. 2018	TA. 2017
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(4.475.534.101)	(4.617.615.299)
524111	Beban Perjalanan Biasa	361.957.144.348	260.230.544.098
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.745.587.550	4.705.971.010
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(5.634.000)	(900.000)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	246.723.564.191	205.566.790.154
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(4.162.309.281)	(2.498.730.398)
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(5.409.195.412)	(715.870.507)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141.667.989.223	131.971.674.780
524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(211.265.918)	-
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.792.210.737	195.301.382
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	887.191.142	835.188.650
JUM LAH		755.509.748.479	595.672.353.870

Sedangkan perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 menurut BA atau Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut :

*Beban Perjalanan Dinas menurut BA atau Unit Kerja Eselon I
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
067.02	Inspektorat Jenderal	28.329.072.891	21.959.300.792
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	344.034.570.847	270.275.872.515
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	47.722.412.323	38.284.935.390
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	37.577.230.675	39.005.402.172
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	49.672.052.411	42.257.725.673
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	55.044.333.395	44.386.765.953
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	50.522.330.843	26.990.067.086
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	85.061.993.737	55.001.324.121
067.10	Sekretaris Jenderal Keenterian Desa, PDT dan Transmigrasi	57.545.751.357	57.510.960.168
JUM LAH		755.509.748.479	595.672.353.870

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp790.217.602.
756,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp790.217.602.756,00 dan Rp1.882.412.351.506,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah menurut jenis akun tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda per Jenis Akun
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah
526111	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	97.128.311.580
526112	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	161.988.668.479
526114	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	179.217.718.506
526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	14.378.863.349
526122	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	27.400.000.000
526123	Pengembalian Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	(217.566.449)
526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	12.347.000.000
526124	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.423.000.000
526124	Pengembalian Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada	(133.009.000)
526222	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	894.385.000
526223	Beban Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk	5.652.264.700
526224	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk	159.838.000
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	134.263.406.931
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	153.004.286.610
526312	Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	(289.564.950)
JUMLAH		790.217.602.756

Sedangkan rincian Beban Barang Untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat menurut BA atau Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat Menurut BA atau Unit Kerja Eselon I Tahun 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	199.539.661.271	306.486.259.700
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	176.915.169.528	506.659.048.143
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	113.645.733.960	361.181.928.715
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	89.041.694.197	353.334.925.887
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	112.937.744.841	187.303.526.803
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	98.137.598.959	167.421.787.258
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	-	24.875.000
JUMLAH		790.217.602.756	1.882.412.351.506

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp243.652.441.767,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp243.652.441.767,00 dan Rp398.394.930.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Akun Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.729.199.113
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.737.003.606
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	43.267.099.815
591312	Beban Penyusutan Irigasi	7.599.338.305
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.806.972.807
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.592.427.593
592115	Beban Amortisasi Software	946.325.227
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	136.974.075.301
JUMLAH		243.652.441.767

Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut BA atau Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan Dan Amortisasi Menurut BA atau Unit Kerja Eselon I

Tahun 2018 Dan 2017

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.02	Inspektorat Jenderal	1.418.859.901	1.313.598.250
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.518.892.008	2.149.746.988
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	21.200.930.865	58.812.762.615
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	36.013.735.044	57.833.391.623
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	46.991.862.616	72.355.708.188
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan	68.327.117.207	91.209.672.988
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	33.360.638.558	81.440.850.245
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,	15.683.653.135	15.047.179.673
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	25.642.411.506	19.302.977.674
Koreksi Atas Revaluasi		(7.505.659.073)	(1.070.957.649)
JUMLAH		243.652.441.767	398.394.930.595

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp17.417.455,
00)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp17.417.455,00) dan Rp4.824.477,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Menurut
BA/Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2018 Dan 31 Desember 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	TA. 2018	TA. 2017
067.03	Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	(4.750.000)	4.750.000
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	(12.667.455)	-
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	74.477
JUMLAH		(17.417.455)	4.824.477

D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional
(Rp670.942.373.043,00)

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2018 dan TA 2017*

(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	(707.939.196.549)	(2.696.346.959.672)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	921.799.141	462.370.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	708.860.995.690	2.696.809.329.672
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	34.143.300.262	30.190.719.980
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	177.386.687.953	92.276.244.090
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	143.243.387.691	(62.085.524.110)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(673.795.896.287)	(2.666.156.239.692)

Adapun rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Per Unit Kerja Eselon I Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.07	Ditjen PKP2Trans	257.000.000	-
067.08	Ditjen PKTrans	502.218.587	458.150.000
067.09	Balilatfo	162.580.554	4.220.000
Jumlah		921.799.141	462.370.000

Adapun rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada masing-masing Unit Kerja Eselon I dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Per Unit Kerja Eselon I Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.03	Ditjen PPMD	-	13.681.662.565
067.04	Ditjen PKP	109.451.572.532	208.523.733.939
067.05	Ditjen PDTu	59.483.676.446	859.032.245.408
067.06	Ditjen PDT	-	227.386.398.696
067.07	Ditjen PKP2Trans	228.062.262.405	746.692.116.007
067.08	Ditjen PKTrans	311.578.393.556	639.587.172.725
067.09	Balilatfo	735.033.232	4.204.951.081
067.10	Setjen	241.130.525	285.133.361
067.55	Konsolidasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	(691.073.006)	(2.584.084.110)
Jumlah		708.860.995.690	2.696.809.329.672

Adapun rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional pada masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional
Per Unit Kerja Eselon I
TA 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.01	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	0	49.360.200
067.02	Inspektorat Jenderal	503.235.006	34.288.817
067.03	Ditjen PPMD	17.382.188.288	4.822.395.320
067.04	Ditjen PKP	2.788.528.640	769.908.190
067.05	Ditjen PDTu	4.455.399.078	5.488.648.016
067.06	Ditjen PDT	1.939.297.210	2.732.287.929
067.07	Ditjen PKP2Trans	133.401.678.449	72.929.601.666
067.08	Ditjen PKTrans	13.844.310.478	4.557.231.345
067.09	Balilatfo	1.135.599.015	189.830.890
067.10	Setjen	1.936.451.789	702.691.717
Jumlah		177.386.687.953	92.276.244.090

Adapun rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional pada masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

*Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional
Per Unit Kerja Eselon I
TA 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.02	Inspektorat Jenderal	54.169.825	31.946.100
067.03	Ditjen PPMD	14.325.885	102.819.931
067.04	Ditjen PKP	142.623.490	308.631.405
067.05	Ditjen PDTu	19.411.914	31.792.250
067.06	Ditjen PDT	1.080.300	8.522.900
067.07	Ditjen PKP2Trans	130.187.057.362	57.792.974.230
067.08	Ditjen PKTrans	12.706.151.350	3.799.225.004
067.09	Balilatfo	306.600	2.142.890
067.10	Setjen	118.260.965	7.469.400
Jumlah		143.243.387.691	62.085.524.110

Defisit LO
Rp5.916.250.69
8.737,00

D.10 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

Nilai Defisit Laporan Operasional pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.916.250.698.737,00 dan Rp8.035.703.371.173,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp3.434.655.232.448,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.434.655.232.448,00 dan Rp7.228.543.249.511,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp5.916.250.698.737,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah defisit sebesar Rp5.916.250.698.737,00 dan Rp8.035.703.371.173,00.

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp0,00

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
(Rp0,00)

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp26.509.500,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp26.509.500,00 dan Rp5.216.650.987,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan menurut Akun adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut Akun
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2018	2017
391113	Koreksi Nilai Persediaan	26.509.500	5.216.650.987
JUM LAH		26.509.500	5.216.650.987

Sedang Penyesuaian Nilai Aset menurut BA atau Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut BA atau Unit
Kerja Eselon I Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	-	5.216.648.987
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	26.509.500	-
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	2.000
JUM LAH		26.509.500	5.216.650.987

Adanya saldo koreksi nilai persediaan sebesar Rp26.509.500,00 terjadi karena adanya perubahan kode satker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditjen PKP2Trans) dari kode 350107 menjadi 418242. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan transaksi dimana satker tersebut tidak melakukan Jurnal TK/TM.

Selisih

Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung, dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

E.3.5 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp(20.488.562.567,00) dan Rp60.901.552.896,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi menurut Akun adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Akun
Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2018	2017
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(22.609.447.777)	60.919.152.896
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2.120.885.210	(17.600.000)
JUMLAH		(20.488.562.567)	60.901.552.896

Sedang Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi menurut BA atau Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut BA atau
Unit Kerja Eselon I Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	(161.695.460)
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.986.838.960	(4.665.335.059)
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	-	41.435.521.930
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	(21.563.982)	12.350.427.504
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.843.861.062	9.120.707.557
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	967.719.287	425.430.179
067.10	Sekretariat Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	(22.982.051.512)	2.396.496.245
067.55	Konsolidasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	(2.283.366.382)	-
JUMLAH		(20.488.562.567)	60.901.552.896

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp62.858.731,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp62.858.731,00 sebesar dan Rp1.577.514.590,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Lain-Lain Menurut Akun
Per 31 Desember 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2018	2017
391119	Koreksi Lainnya	62.858.731	1.577.514.590
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	-	-
JUMLAH		62.858.731	1.577.514.590

Sedang Koreksi Lain-Lain menurut BA dan Eselon 1 adalah sebagai berikut:

*Rincian Lain-Lain Menurut BA/ Unit Kerja Eselon I
Tahun 2018*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	(10.369.409)	1.494.703.606
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	230	-
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	73.227.910	58.001.006
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	24.809.978
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	-	-
JUMLAH		62.858.731	1.577.514.590

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas
Rp5.413.328.908.270,00*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.413.328.908.270,00 dan Rp4.174.119.635.637,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Akun
Tahun 2018 Dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2018	2017
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	5.460.676.358.438	4.182.348.770.554
313121	Diterima dari Entitas Lain	(40.622.051.346)	(20.305.076.219)
313211	Transfer Keluar	(476.566.205.095)	(12.305.643.913)
313221	Transfer Masuk	469.840.806.273	12.323.760.472
391131	Pengesahan Hibah Langsung	-	12.057.824.743
JUMLAH		5.413.328.908.270	4.174.119.635.637

Pada Transfer Masuk dan Transfer Keluar terdapat selisih sebesar Rp6.725.398.822,00 yang disebabkan oleh koreksi revaluasi pada Tahun 2018.

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas menurut BA atau Unit Kerja Eselon 1 adalah sebagai berikut:

*Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut BA/Unit Kerja
Eselon I Tahun 2018 dan 2017*

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2018	2017
067.01	Kementerian PDT	-	(49.360.200)
067.02	Inspektorat Jenderal	58.435.536.394	48.408.887.965
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.170.247.448.917	2.347.094.873.355
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	321.321.175.621	285.227.808.181
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	243.628.806.731	192.933.415.904
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	297.329.605.464	196.145.280.315
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	368.360.315.519	332.643.568.752
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	364.018.998.285	290.523.767.884
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	285.475.093.697	192.720.272.590
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	311.237.326.464	288.471.120.891
067.55	Konsolidasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	(6.725.398.822)	-
Jumlah		5.413.328.908.270	4.174.119.635.637

E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp2.911.334.247.645,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.911.334.247.645,00 dan Rp3.434.655.232.448,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI****Sekretariat Jenderal**

NO	BIRO	TOTAL	TOTAL SETOR	%
		TEMUAN	2018 & 2019	
1	PERENCANAAN	2.382.137.738	896.789.500	37,65
	Belanja Barang Melalui Mekanisme UP/TUP/GUP	200.405.900		
	Belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya	2.181.731.838		
2	HUMAS & KERJASAMA	491.689.500	72.150.000	14,67
	Belanja Barang Melalui Mekanisme UP/TUP/GUP	13.139.500		
	Belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya	478.550.000		
3	HUKUM & ORTALA	239.880.000	239.880.000	100,00
	Belanja Barang Melalui Mekanisme UP/TUP/GUP	157.688.500		
	Belanja Perjalanan Dinas	82.191.500		
4	SDM & UMUM	6.256.863.145	421.307.550	6,73
	Belanja Barang Melalui Mekanisme UP/TUP/GUP	8.000.000		
	Belanja Perjalanan Dinas	2.919.992.498		
	Lembur	1.988.822.700		
	PNBP Belum Disetor	6.000.000		
	Belanja Barang Mekanisme LS	923.997.755		
	Belanja Peralatan dan Mesin	316.449.545		
	Belanja Modal	93.600.647		
5	KEUANGAN & BMN	927.303.155	301.523.511	32,52
	Belanja Barang Melalui Mekanisme UP/TUP/GUP	226.884.900		
	Belanja Perjalanan Dinas	700.418.255		
6	TUNJANGAN KINERJA	776.496.956	10.963.398	1,41
	TUNKIN GANDA	33.044.210		
	TUNKIN ABSEN	743.452.746		
TOTAL		11.074.370.494	1.942.613.959	17,54

Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2017, terdapat temuan sebesar Rp658.438.450,00 yang terkait

dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan. Rincian atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta tindak lanjutnya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Temuan dengan rekomendasi perbaikan administrasi.

Jenis Temuan	Nilai (Rp)	Rekomendasi BPK-RI	Tindak Lanjut
BBM	147.865.750	Rekomendasi berupa perbaikan SOP	Dalam proses

b. Temuan dengan rekomendasi penyetoran/ pengembalian ke kas negara.

No	Jenis Temuan	Nilai Temuan	Rekomendasi BPK-RI	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2018		Sisa		Keterangan
				Rp	%	Rp	%	
1	Perjalanan Dinas, RDK, Paket Meeting	399.854.700	Pengembalian ke kas negara	321.304.644	80,36	78.550.056	19,64	Nilai tindak lanjut tersebut adalah pengembalian ke kas negara sampai dengan periode pelaporan ini (31 Desember 2018)
2	Belanja Barang Jasa (Konsumsi)	110.718.000	Pengembalian ke kas negara	110.718.000	100,00	0	0,00	
Jumlah		510.572.700		432.022.644	84,62	78.550.056	15,38	

Direktorat Jenderal PPMD

Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp527.344.350 yang sudah setor pengembalian awal tahun 2018 sebesar Rp21.197.500, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (350456) telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Temuan Tunjangan Kinerja (TUKIN) sebesar Rp 4.099.434, atas nama RS belum dapat ditindaklanjuti;
2. Temuan Perjalanan Dinas (Perdin) dan Rapat dalam Kantor (RDK) sebesar Rp470.688.916, yang sudah setor sebesar Rp 266.551.967 dan masih dalam proses sebesar Rp 204.136.949;
3. Temuan Belanja Bahan sebesar Rp52.556.000, sudah setor

sebesar Rp52.556.000.

Direktorat Jenderal PKP

1. Tindak Lanjut Temuan BPK TA. 2015

Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- Terkait Program PKKPM berupa bantuan dalam bentuk uang (sesuai PMK-173/PMK.05/2016) untuk 183 Kecamatan. PPK terkait telah melengkapi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut untuk 173 Kecamatan senilai Rp372.000.000.000,00. Namun Inspektorat Jenderal belum melakukan penelitian atas kebenaran bukti-bukti tersebut. Sedangkan sisanya untuk 8 Kecamatan dengan nilai sebesar Rp14.000.000.000,00 masih dalam proses pengumpulan bukti.
- Terkait atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.099.202.379,11 dan sudah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.309.209.947,00 dan sisanya sebesar Rp789.992.432,11 masih dalam proses.
- Terkait denda keterlambatan sebesar Rp25.706.000,00 dan sudah disetor ke Kas Negara Rp25.706.000,00.
- Terkait kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.104.800.000 dan sudah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.104.800.000.

2. Tindak Lanjut Temuan BPK TA. 2016

Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- Terkait atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp284.518.542,28, sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp284.518.542,28.

- Terkait atas kekurangan volume dan denda keterlambatan sebesar Rp292.881.649,00 dan sudah disetor ke Kas Negara.
3. Tindak Lanjut Temuan BPK TA. 2017
- Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.332.506.596,00 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan tindak lanjut:
- Terkait atas temuan tunjangan kinerja ganda sebesar Rp2.180.420,00 sudah disetor.
 - Terkait atas temuan barang dan jasa konsumsi rapat sebesar Rp84.957.400,00 sudah disetor.
 - Terkait atas temuan perjalanan dinas dan paket meeting yang terdapat rekam absensi sebesar Rp1.099.375.949,00, sudah sebesar Rp734.669.778,00 dan masih dalam proses sebesar Rp364.706.171,00.
 - Terkait atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp978.226.440,00, sudah disetor sebesar Rp304.260.149,00 dan Rp673.966.291,00 masih dalam proses.
 - Terkait denda keterlambatan pekerjaan pasar sebesar Rp167.766.387,00, sudah disetor Rp55.000.000,00 dan Rp112.766.387,00 masih dalam proses.

Direktorat Jenderal PDTu

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 107C/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Nomor 58C/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 pada Ditjen PDTU terdapat :
 - a) Pertanggungjawaban Belanja yang menggunakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada bulan Desember 2015 belum dilengkapi bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp6.285.746.956,00. Menindaklanjuti temuan tersebut Inspektorat Jenderal

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi masih melakukan verifikasi dokumen dan meneliti kebenaran pembayaran tersebut, dan hasilnya akan dikomunikasikan dengan Tim BPK.

- b) Terdapat temuan BPK di tahun 2015 sebesar Rp1.735.140.796,90 dan sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sesuai dengan nilai tersebut.
 - c) Terdapat temuan BPK di tahun 2016 sebesar Rp1.700.627.741,70 yang harus di setorkan ke kas negara. Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp964.268.091,80. Terdapat sisa sebesar Rp736.359.649,90 yang belum disetorkan ke kas negara namun sudah ditindaklanjuti dengan surat teguran kepada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan fisik. Rincian terlampir.
 - d) Terdapat temuan BPK di tahun 2017 sebesar Rp2.199.406.212,00 yang harus di setorkan ke kas negara. Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp1.860.173.253,00. Terdapat sisa sebesar Rp339.232.959,00 yang belum disetorkan ke kas negara namun sudah ditindaklanjuti dengan surat teguran kepada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan fisik, dan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan. Rincian terlampir.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas sistem pengendalian intern Nomor: 58B/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebagai tindak lanjut temuan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu telah ditindaklanjuti dengan melakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN. Progres Hibah BMN berupa Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pengadaan Tahun Anggaran 2012-2017, total BMN berupa Bantuan

Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebesar Rp1.884.027.784.877,00. Usulan Hibah BMN yang telah diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan telah dikeluarkan dari pencatatan laporan keuangan sebesar Rp1.590.526.508.685,00 yang telah ada Persetujuan Hibah BMN dari Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp585.645.248.808,00 dan sudah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu tentang Penghapusan Barang Milik Negara sebesar Rp438.968.200.267,00. Jumlah bantuan pemerintah yang sedang dalam proses pengajuan usulan hibah per 31 Desember 2018 sebesar Rp293.501.276.192,00 dengan daftar terlampir.

Direktorat Jenderal PDT

- A. Progres untuk Temuan BPK di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2014 No. LHP 81/HP/XVI/01/2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Temuan Pemeriksaan	Pelaksana	Nilai Temuan	Pengembalian	Sisa Temuan
1	Pengadaan Kapal (Deputi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha – Kementerian PDT)	PT. Sarana Usaha Bahari	1.776.199.000	26.199.000	1.750.000.000
2	Bantuan Stimulan Pengembangan Infrastruktur Energi Listrik Tenaga Surya (PLTS) SHS 80 WP di Kab. Paniai – Deputi Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT	PT. Mahardhika Karya Nugraha	675.350.000	10.000.000	665.350.000
3	Pekerjaan Kontruksi Elektrifikasi di 18 Kabupaten (6 Paket) Deputi Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT	PT. Ghanda Victory	250.347.510	166.338.000	84.009.510
		PT. Leondra Mitra	167.451.592	167.451.592	-
		PT. Krismabe Karya	266.778.506	266.778.506	-
		PT. Banten Mula Mandiri	268.491.780	268.491.780	-
		PT. Mahardhika Karya Nugraha	37.551.322	37.551.322	-
		PT. Berdikari Utama Jaya	68.187.600	68.187.600	-
4	Bantuan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Kab. Nabire, Biak Numfor dan Kab. Halmahera Selatan	PT. Tegar Kawini Mandiri	371.679.000	371.679.000	-
		PT. Indra Acis	626.306.000	626.306.000	-
5	Peningkatan Infrastruktur Infotel Warung Informasi Masyarakat (Infotel II-6) di Kab. Seruyan – Eks Deputi II	PT. Hexadata Primakon	53.455.000	53.455.000	-
TOTAL			4.561.797.310	2.062.437.800	2.499.359.510

Sehingga total progres Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI No. 81/HP/XVI/01/2016 TA 2014 dengan nilai temuan Rp4.561.797.310,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp2.156.038.294,- sehingga sisa nilai temuan Rp2.499.359.510,-

B. Progres untuk Temuan BPK di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2015 No. 107C/HP/XVI/05/2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	TEMUAN PEMERIKSA	PELAKSANA	NILAI TEMUAN	PENGEMBALIAN	SISA TEMUAN
1	Pembangunan PLTS TA. 2015	PT. Multi Servindo	441.561.000	441.561.000	-
2	Pembangunan Jalan Baru Ruas Atiahu-Balakeu	PT. Rio Buana	17.126.037.916	171.260.379	16.954.777.537
3	Pembangunan PLTS TA. 2015	PT. Total Daya	119.225.000	119.225.000	-
4	Pengadaan KJA	PT. Panorama Cakra Buana	154.151.250	9.000.000.000	- 8.845.848.750
5	Pembangunan Irigasi Moswaren	PT. Nikita Raya	4.658.883.726	46.588.837	4.612.294.889
6	Pembangunan Jalan Kampung Ani-Keyen	PT. Maesa Jaya	182.296.238	50.000.000	132.296.238
7	Pembangunan Jalan Desa	PT. Baya Raya Perkasa	116.591.880	116.591.880	-
8	Pembangunan Jalan Kampung Keyen-Wersar	PT. Mekar Papua Nusantara	2.088.724.852	208.872.485	1.879.852.367
9	Pembangunan Jalan Penghubung Kawar-Mega	PT. Putra Papua Barat	1.536.697.091	153.669.709	1.383.027.382
10	Pembangunan Jalan Sailala-	PT. Papua Indo	12.679.844.936	126.798.449	12.553.046.487
11	Pembangunan Jalan Kampung Kalibumi-kampung kali jernih	PT. Apro Megatama	46.388.481.561	463.884.815	45.924.596.746
12	Pembayaran Uang Saku Rapat	-	39.000.000	-	39.000.000
13	Bantuan Alat Mesin Pengembangan Inovasi DT	PT. Prama Bhimasena	459.143.825	459.143.825	-
TOTAL			85.990.639.275	11.357.596.379	74.633.042.896

C. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2015 dengan No. LHP 28/HP/XVI/01/2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	TEMUAN PEMERIKSA	PELAKSANA	NILAI TEMUAN	PENGEMBALIAN	SISA TEMUAN
1	Pekerjaan Pengadaan 5 Paket Peternakan Modern Kab. Bangkalan Tahun 2015	PT. Aldino Fiqo	2.619.899.800	100.000.000	2.519.899.800
	Pekerjaan Pengadaan 5 Paket Peternakan Modern Kab. Bangkalan Tahun 2015		526.080.000	-	526.080.000
2	Pekerjaan Pengadaan Bantuan Stimulan sarana Pengembangan Komoditas Perikanan (Jukung) Tahun 2015	CV. Edutama	792.165.000	500.000.000	292.165.000
3	Pekerjaan Pembangunan Warung Internet di Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur Tahun 2015	PT. Hexadata Prima	40.425.784	40.425.784	-
TOTAL			3.978.570.584	640.425.784	3.338.144.800

D. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2016 dengan No. LHP 58C/HP/XVI/05/2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	TEMUAN PEMERIKSA	PELAKSANA	NILAI TEMUAN	PENGEMBALIAN	SISA TEMUAN
1	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pusat Belajar Masyarakat (PBM) di 5 Kabupaten Daerah Tertinggal	PT. Abdi Pratama Perkasa	127.510.752	127.510.752	0
2	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pusat Belajar Masyarakat di Kab Aceh Singkil	CV. Puga Mandiri	3.644.094	3.644.094	0
3	Belanja Barang Pembangunan Saung Terampil Kab. Sumbawa dan Kab. Bima	PT. Formitra Multi Prakarsa	18.945.795	18.945.794	1
4	Pekerjaan Bantuan Peningkatan Jalan Desa Sausu-Manggalapi Kabupaten Parigi Moutong	PT. Makmur Sentosa Abadijaya	211.454.353	50.000.000	161.454.353
5	Pekerjaan Pembangunan Radio Komunitas Siaran Daerah	PT. Tressa Lestari	288.795.331	-	288.795.331
6	Pekerjaan Pembangunan Kawasan Internet Masyarakat	PT. Tressa Lestari	13.341.290	-	13.341.290
7	Pekerjaan Bantuan Alat Pasca Panen (Paket II)	CV. Hartake	58.170.000	58.170.000	-
8	Kekurangan Volume Pekerjaan Bantuan Alat Pasca Panen (paket I)	PT. Jeremy Duta Prima	49.500.000	49.500.000	-
9	Bantuan Pengembangan Kakao	PT. Agrindo Harthamekar	1.636.932.727	76.187.446	1.534.809.281
		CV. Atha Wira Kelana		25.936.000	
TOTAL			2.408.294.343	409.894.086	1.998.400.257

E. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2017 dengan No. LHP 80C/HP/XVI/05/2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	TEMUAN PEMERIKSA	PELAKSANA	NILAI TEMUAN	PENGEMBALIAN	SISA TEMUAN
1	Penyusunan Exit Strategis	PT. AD	181.818.182	-	181.818.182
		PT. EL	181.818.182	-	181.818.182
		PT. FE	181.818.182	-	181.818.182
		CV. DU	181.818.182	-	181.818.182
		CV. MA	181.818.182	-	181.818.182
		CV. HA	181.818.182	-	181.818.182
		PT. MU	90.909.091	-	90.909.091
		CV. PE	90.909.091	-	90.909.091
2	Pembangunan Asrama sekolah Siswa Dan Guru Kab. Kapuas Hulu Dan Kab. Buol	CV. AJK	151.847.720	-	151.847.720
3	Pembangunan Jalan Di Kab. Lembata	PT. Ananda Perdana Mandiri	96.591.474	-	96.591.474
4	Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Sumba Timur	CV. Pinu Tana	46.229.268	-	46.229.268
5	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	LKFT-UGM	846.721.986	-	846.721.986
6	Indikasi Bukti Tidak Riil Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	LKFT-UGM	872.961.941	-	872.961.941
7	Kegiatan Perjadin. RDK dan Paket Meeting	Perorangan	597.165.762	270.122.419	327.043.343
8	Belanja Konsumsi Rapat	Satker	105.998.500	51.947.000	54.051.500
9	Belanja Pegawai (Tukin)	Rifmayulis	3.438.660	-	3.438.660
TOTAL			3.993.682.585	322.069.419	3.671.613.166

Direktorat Jenderal PKTRANS

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKTrans) merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dimana sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK Ditjen PKTrans sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Nomor LHP	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sisa
81/HP/XVI/01/2016	Rp1.189.290.000	Rp1.162.662.650	Rp26.650.000
107C/HP/XVI/05/2016	Rp399.802.038	Rp283.669.987	Rp116.132.051
58C/HP/XV/05/2017	Rp216.498.904,55	Rp 115.273.611,36	Rp101.225.294,93
80C/HP/XVI/05/2018	Rp1.060.878.183	Rp383.597.000	Rp677.281.183

Sampai dengan periode 31 Desember 2018, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. LHP nomor 58C/HP/XV/5/2017 tanggal 18 Mei 2017, belum dilakukan setoran pengembalian. Sisa saldo LHP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp101.225.294,93
1. LHP nomor 81/HP/XVI/01/2016 tanggal 29 Januari 2016, belum dilakukan setoran pengembalian. Sisa saldo LHP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp26.650.000,00.
2. LHP nomor 107C/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, belum dilakukan setoran pengembalian. Sisa saldo LHP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp116.132.051,00
3. LHP nomor 80C/HP/XVI/05/2018 terdapat temuan sebesar Rp1.060.878.183,00. Dari jumlah tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp383.597.000,00. Sisa saldo LHP per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp677.281.183,00

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

PENGUNGKAPAN TERKAIT REVAL

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil revaluasi seharusnya disajikan Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), Maka hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 – 2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil Penilaian Kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK.

Atas kebijakan tersebut, terdapat perbedaan penyajian nilai asset tetap objek revaluasi pada Laporan BMN dan Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

NO	TEMUAN PEMERIKSA	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut LBMN	Selisih
1	Tanah	122,404,255,697	641,510,714,000	(519,106,458,303)
2	Gedung dan Bangunan	335,429,061,847	540,399,271,693	(204,970,209,846)
3	Akumulasi Gedung dan Bangunan	(39,271,619,043)	(158,149,931,584)	118,878,312,541
4	Jalan, Irigasi, dan Jembatan	732,005,217,423	730,506,691,595	1,498,525,828
5	Akumulasi Jalan, Irigasi, dan Jembatan	(191,051,330,985)	(187,077,695,279)	(3,973,635,706)
TOTAL		959,515,584,939	1,567,189,050,425	(607,673,465,486)

F.3 PENGUNGKAPAN SETELAH TANGGAL NERACA

Inspektorat Jenderal

1. Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat Revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Pada tanggal 03 April 2018, terdapat penambahan pagu yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri berupa hibah uang yaitu sebesar Rp6.234.588.000,00.
 - b. Pada tanggal 24 Oktober 2018, karena adanya optimalisasi sisa anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Inspektorat Jenderal.
 - c. Pada tanggal 20 Desember 2018, pemutakhiran data POK ke Kanwil Direktorat jenderal Perbendaharaan.
2. Nilai perolehan BMN (Aktiva Tetap) Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.200.530.690,00, meliputi :

a. Peralatan & Mesin (Intra)	Rp 8.147.351.365,00
b. Peralatan & Mesin (Ekstra)	Rp 3.304.325,00
c. Aktiva Tetap Lainnya	<u>Rp 49.875.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp8.200.530.690,00</u>
3. Terhadap BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp8.200.530.690,00 tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Untuk BMN Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor) dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 7 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara sejumlah 934 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp3.591.024.200,00 dan dengan kondisi 931 unit baik dan 3 unit rusak ringan;
 - b. Untuk BMN Kendaraan Bermotor, berupa 14 unit Kendaraan Bermotor dengan nilai perolehan sebesar Rp3.475.311.005,00 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-

- 144/KM.6/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- c. Untuk BMN Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor) yaitu 1 (satu) unit *Conference System (Sound System)* senilai Rp148.250.000,00 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-146/KM.6/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- d. Untuk BMN kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), berupa 5 (lima) unit Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan nilai perolehan sebesar Rp88.795.000,00 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-256/KM.6/WKN.07/KNL.02/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- e. Untuk BMN Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor) dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit pengadaan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp135.136.800,00 sampai dengan 31 Desember 2018 belum ditetapkan status penggunaannya.
- f. Untuk BMN peralatan dan mesin (di luar kendaraan bermotor) dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit pengadaan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp690.093.685,00 akan diusulkan penetapan status penggunaannya pada tahun 2019.
- g. Untuk BMN peralatan dan mesin (kendaraan bermotor) dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit pengadaan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp71.920.000,00 akan diusulkan penetapan status penggunaannya pada tahun 2019.

Direktorat Jenderal PPMD**1. Pendapatan Bunga Lainnya**

Terdapat saldo Pendapatan Bunga Lainnya sebesar Rp308.951,00 pada satuan kerja BPMD Kabupaten Melawi (350210) merupakan Bunga Bank yang dikembalikan ke Kas Negara, berikut rincian bukti setor:

- a. Dok Pelmasy Kec. Nanga Pinoh sebesar Rp117.001,00
NTPN 66917442RGMVNG30
- b. Dok Perencanaan Kec. Nanga Pinoh sebesar
Rp86.401,00 NTPN 608A8442UDR75A30
- c. Operasional POKJA Kec. Belimbing Hulu sebesar
Rp22.121,00 NTPN 17CA32HROOD9S7I0
- d. Operasional POKJA Pinoh Utara sebesar Rp19.980,00
NTPN 296183PSABV5T930
- e. Dok Pelmas Kec. Belimbing Hulu sebesar Rp12.119,00
NTPN 8A0C02HRPB1BBPI0
- f. Dok Pelmas Kec. Soka sebesar Rp51.329,00 NTPN
0BB044UFEPDLJO8G

2. Pendapatan Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu

Terdapat saldo Pendapatan Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp66.405.000 pada satuan kerja BPMD Provinsi Sulawesi Utara (350258) merupakan Pengembalian Belanja Bantuan ke TPID yang tidak habis digunakan dalam kegiatan Bursa Inovasi Desa. (Bukti Terlampir)

3. Jurnal Tidak Lazim Aset Ekstrakomtabel

Terdapat Jurnal Tidak Lazim sebesar Rp64.337.500,- pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (350456) yang disebabkan adanya mutasi tambah aset ekstrakomtabel di aplikasi Simak BMN.

4. Keterlambatan Penyetoran Pengembalian Dana Kegiatan Pendamping BUMDES

Terdapat Keterlambatan Penyetoran Pengembalian Dana Kegiatan Pendamping BUMDES Rp132.160.763, pada

Satuan Kerja Ditjen PPMD (350456), Kontrak Swakelola ditandatangani tanggal 10 Oktober 2018 No.274/SPK/DPPMD.3/PPK.VI/10/2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) dengan Universitas Negeri Padang. Pencarian Tahap I tanggal 6 Desember 2018 No SPM 2584T/350456/2018 sebesar Rp280.000.000, Pencarian Tahap II tanggal 12 Desember 2018 No SPM 25944T350456/2018 sebesar Rp120.000.000. Hasil Evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) bahwa Universitas Negeri Padang tidak dapat memberikan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp400.000.000. Sesuai Nilai Kontrak. Universitas Negeri Padang hanya bisa melengkapi bukti penggunaan dana sebesar Rp267.839.237, sehingga Universitas Negeri Padang bersedia segera mengembalikan sisa dana sebesar Rp132.160.763 ke rekening Bendahara Negara. Pada tanggal 14 Februari 2019 sisa dana sebesar Rp132.160.763 telah disetorkan ke rekening Bendahara Negara (Bukti Terlampir).

5. Utang Kepada Pihak Ketiga

Terhadap utang pihak ketiga sebesar Rp 4.310.901.259 akan dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sesuai PMK no.206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara revisi anggaran tahun 2019.

Direktorat Jenderal PDT

1. Bantuan Pemerintah

Pertanggal 31 Desember 2018 terdapat Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017 yang sudah dilakukan proses pengusulan untuk dilakukan proses hibah sebesar Rp89.041.694.197,- dan yang masih dalam proses pengumpulan administrasi hibah sebesar

Rp176.658.722.920,- sehingga bantuan tersebut belum dapat dihilangkan dari neraca.

2. Aset Tetap

Pertanggal 31 Desember 2018 terdapat Aset Lain-lain sebesar Rp2.043.895.750,- kondisi barang tersebut sudah Rusak Berat dan telah dihentikan penggunaannya dari kegiatan operasional. Saat ini kami sedang melakukan proses penghapusan atas Aset rusak berat tersebut.

3. Aset Lain-lain

- Dalam Aset Lain-lain terdapat Bantuan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah belum dapat kami lakukan penghapusan hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam proses penghapusan dimana Bantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah tercatat berupa 1 Paket yang terdiri dari beberapa Kabupaten sedangkan usulan yang telah disetujui untuk dihibahkan baru beberapa Kabupaten.
- Adanya aset Satker Tugas Pembantu yang tidak aktif dan telah disetujui oleh Sekjen untuk dihibahkan sebanyak 2 Kabupaten, namun belum dibuatkan SK penghapusannya sehingga masih tercatat pada SIMAK BMN Ditjen PDT yaitu Kabupaten Samosir dan Kabupaten Pinrang.
- Adanya proses likuidasi atas Aset 6 Satuan Kerja Tugas Pembantuan yang sudah tidak aktif ke Satuan Kerja Pusat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, antara lain:

KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI SAIBA	NILAI SIMAK	SELISIH
067.06.071247	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN KAB. SAMOSIR	- 172.265.918	1.696.896.082	- 1.869.162.000
067.06.130231	BAPPEDA KAB. SANGGAU	- 1.863.815.000	2.146.541.700	- 4.010.356.700
067.06.150650	DINAS PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	- 39.004.792	139.713.208	- 178.718.000
067.06.190132	BAPPEDA KABUPATEN PINRANG	- 1.444.298.734	2.064.500.716	- 3.508.799.450
067.06.210325	BAPPEDA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	- 789.482.966	3.540.717.034	- 4.330.200.000
067.06.230439	BAPPEDA KAB. BIMA	- 126.426.782	1.281.010.218	- 1.407.437.000
TOTAL		- 4.435.294.192	10.869.378.958	- 15.304.673.150

4. Adanya pemutusan kontrak pada kegiatan Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Nias Selatan atas nama pihak penyedia CV. Cermin 2002 nomor kontrak 27/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018 dengan nilai kontrak Rp935.222.000,- dengan alasan wanprestasi, Pelaksana tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan kontrak sampai dengan batas waktu kontrak sehingga pekerjaan tersebut hanya terbayarkan sebesar Rp280.566.600,-.
5. Adanya Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 13 Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang belum terselesaikan dikarenakan bencana Alam atas nama penyedia OMS Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Negeri 13 Sigi Provinsi Sulawesi Tengah nomor kontrak 149/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018 dengan nilai kontrak Rp320.000.000,-. Sehingga atas pekerjaan tersebut baru terbayarkan Rp128.000.000,-.

Direktorat Jenderal PKP

1. Kejadian setelah tanggal neraca
 - a) Sudah disetor di tanggal 7 Januari 2019 sebesar Rp2.390.000,00 untuk pembayaran temuan BPK terkait perjalanan dinas dan paket meeting TA.2017.

- b) Sudah disetor di tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp3.006.667,00 dan Rp9.600.000,00 untuk pembayaran temuan BPK terkait perjalanan dinas dan paket meeting TA.2017.
- c) Sudah disetor di tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp840.203,00 untuk pembayaran temuan BPK terkait perjalanan dinas dan paket meeting TA.2017.
- d) Progres hibah akun 526 (Persediaan) yang diserahkan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bantuan TA 2015	Nilai Bantuan	Periode s.d 29 Jan 2019			Belum Diusulkan
		Usulan Ke Sekjen	Disetujui Sekjen	SK Penghapusan	
PEKP	42.008.939.340	1.162.651.520	38.614.554.920		2.231.732.900
PSPKP	325.893.994.254	244.212.940.227	40.588.038.290	20.619.885.000	20.473.130.737
PSDAKP	141.760.055.240	65.490.793.547	43.059.282.742	19.236.176.458	13.973.802.493
KSPKP	4.743.695.000	-	-	4.743.695.000	-
Jumlah	514.406.683.834	310.866.385.294	122.261.875.952	44.599.756.458	36.678.666.130

Bantuan TA 2016	Nilai Bantuan	Periode s.d 29 Jan 2019			Belum Diusulkan
		Usulan Ke Sekjen	Disetujui Sekjen	SK Penghapusan	
PEKP	45.912.926.279	29.334.348.000	16.108.213.686	470.364.593	-
PSPKP	296.285.854.191	140.929.889.938	109.676.165.473	45.679.798.771	-
PSDAKP	157.260.267.673	10.658.579.428	79.897.222.265	66.704.465.980	-
KSPKP	-	-	-	-	-
Jumlah	499.459.048.143	180.922.817.366	205.681.601.424	112.854.629.344	-

Bantuan TA 2017	Nilai Bantuan	Periode s.d 29 Jan 2019			Belum Diusulkan
		Usulan Ke Sekjen	Disetujui Sekjen	SK Penghapusan	
PEKP	20.673.287.000	13.832.543.420	6.517.544.650	323.198.930	-
PSPKP	64.055.705.240	33.127.726.231	30.927.979.000	-	-
PSDAKP	61.086.177.288	50.556.927.863	10.529.249.425	-	-
KSPKP	-	-	-	-	-
Jumlah	145.815.169.528	97.517.197.514	47.974.773.075	323.198.930	-

Bantuan TA 2018	Nilai Bantuan	Periode s.d 29 Jan 2019			Belum Diusulkan
		Usulan Ke Sekjen	Disetujui Sekjen	SK Penghapusan	
PEKP	16.233.590.400	-	-	-	16.233.590.400
PSPKP	68.626.870.696	17.521.279.800	-	-	51.105.590.887
PSDAKP	63.355.099.130	8.316.065.933	-	-	55.039.033.197
KSPKP	-	-	-	-	-
Jumlah	148.215.560.226	25.837.345.733	-	-	122.378.214.484

- Gedung dan bangunan yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu Gedung B lantai 3 dan lantai 4 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih dalam proses pemindahtanganan dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Pengembalian Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2018 disetor pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp569.000,00 dengan Nomor NTPN : 3758D7JH2QVJ4FM9.

Direktorat Jenderal PDTu

- Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pada akun persediaan terdapat pembayaran uang muka (UM) pekerjaan PLTS Kabupaten Sanggau atas nama PT. Multi Servindo Prima dengan nilai terbayar Rp1.042.673.600

(SP2D nomor 151751302019408) dan Kepulauan Aru atas nama PT. Multi Servindo Prima dengan nilai terbayar Rp667.877.400 (SP2D nomor 151751301041391).

Terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan audit ulang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan LHA No.RHS.16/IJ/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 untuk dilakukan penagihan kepada penyedia dengan ditambahkan nilai denda keterlambatan pekerjaan maksimal 5% dari nilai kontrak sehingga total yang ditagihkan kepada PT. Multi Servindo Prima sebesar Rp1.880.376.273,-. telah dilakukan Penyampaian Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi kepada Direktur PT. Multi Servindo Prima Nomor: 036.7/DPDTT/DPDTU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 (surat terlampir).

Selanjutnya terdapat Surat Tanggapan dari PT. Multi Servindo Prima terkait Tanggapan Penyampaian Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 067/MSP-PDTU/DIR-BSLN/X/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 (surat terlampir) yang berisi sebagai berikut:

- a. Sesuai kronologis dalam hasil audit, kami sudah dan sedang melakukan pekerjaan di lapangan dengan dibuktikan dengan adanya progres pekerjaan dan adanya pengiriman material utama di lapangan;
- b. Kami sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp1.958.999.711 dengan rincian biaya diantaranya, biaya pembelian material serta pembuatan pondasi dan pemasangan instalasi rumah-rumah Rp409.531,812,00, pembelian material utama yang tidak bisa dipakar Rp759.282.899,00, biaya transportasi material Rp156.000.000,00, pembelian material pendamping tiang listrik, shelter dll Rp634.185.000,00;
- c. Tidak adanya Surat Teguran Resmi mengenai

keterlambatan progress pekerjaan dan Surat Pemutusan Kontrak resmi yang kami terima hingga surat ini dibuat. Adapun beberapa permohonan yang disampaikan PT. Multi Servindo Prima adalah sebagai berikut:

- a) Kami merasa keberatan jika harus mengembalikan semua uang muka yang kami terima. Berdasarkan perhitungan kami, kelebihan bayar yang kami terima adalah sebesar Rp450.604.738,00;
- b) Memohon penghapusan denda sebesar 5% (lima persen) dengan alasan sama dengan point a diatas;
- c) Pengenaan sanksi daftar hitam menurut kami adalah suatu tindakan yang berlebihan karena kesalahan tidak hanya dilakukan oleh kami, akan tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan surat tanggapan PT. Multi Servindo Prima ditindaklanjuti kembali dengan Surat Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor 42/DPDTT/DPDTU/03/2018 Tanggal 13 Maret 2018 dengan hal jawaban atas tanggapan PT. Multi Servindo Prima terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan poin-poin sebagai berikut:

- a. Uang Muka yang sudah diterima bersih setelah dipotong pajak oleh PT. Multi Servindo Prima yaitu sebesar Rp.1.508.394.973,00 wajib dikembalikan ke Negara karena pekerjaan konstruksi yang dilakukan tidak berfungsi dan tidak ada serah terima material dari PT. Multi Servindo Prima Kepada DITJEN PDTu;
- b. Mengenai denda 5% (lima persen) akan kami pertimbangkan kembali dengan membicarakan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah saudara membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan uang muka sebagaimana tersebut dalam poin 1.

Dilanjutkan dengan surat Teguran Ke-2 Kepada PT.

Multi Servindo Prima Nomor:086/UM.01.01./I/2019 Tanggal 29 Januari 2019 (surat terlampir) perihal Teguran Ke-2 Kepada Direktur PT. Multi Servindo Prima dengan poin-poin sebagai berikut:

- a) Kami memberikan peringatan ke-2 kepada saudara Direktur PT. Multi Servindo Prima untuk segera melakukan pengembalian ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.508.397.973,00 sebagaimana tercantum dalam surat nomor 101/UM.01.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
- b) Apabila poin 1 tidak segera saudara tindaklanjuti, maka kami akan menyerahkan kepada Pihak yang Berwajib/Aparat Hukum.

2. Jurnal Tidak Lazim

Terdapat Jurnal Tidak Lazim pada Periode Pelaporan Keuangan Tahunan Unaudited Per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jurnal Umum D:Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya K:Persediaan yang Belum Diregister; berdasarkan memo penyesuaian dengan nomor dokumen 201808350455000 yang merupakan Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Terkait Pekerjaan Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan Senilai Rp145.002.230,- Tunggakan Tahun 2017 (memo penyesuaian terlampir);
- f. Jurnal Umum D:Persediaan yang Belum Diregister K:Koreksi Lainnya; berdasarkan memo penyesuaian dengan nomor dokumen 201808350455001 yang merupakan Koreksi Nilai Persediaan Selisih atas nilai Pengakuan Terhadap Utang Kepada Pihak Ketiga terhadap yang sudah dibayarkan di Bulan Agustus 2018 senilai Rp230,- (memo penyesuaian terlampir).

3. TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi)

Berdasarkan hasil Laporan Audit Kasus Atas Hilangnya Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor: Rhs.561/PW.03/XI/2018 Tanggal 26 November 2018 belum dibukukan di Tahun Anggaran 2018 sebagai pengakuan terhadap Piutang. Hasil laporan adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya sepeda motor operasional Merk Honda Vario 150 CC tahun pembuatan tahun 2015 warna putih, nomor polisi B 3393 PBQ No. Rangka MH1KF1111FK354671 dan Nomor Mesin: KF11E1360792 atas nama Kemendesa PDTT – DITJEN PDTu merupakan kesalahan Saudara La Ode Musran (Tenaga Penunjang Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri – PPNPN) dan yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian negara sesuai SKTJM yang dibuat sebesar Rp17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); yang bersangkutan telah melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sehingga sisa kerugian negara sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Hilangnya sepeda motor operasional Merk Yamaha N-Max Non ABS tahun pembuatan 2017 Warna Putih, Nomor Polisi B 3459 PFQ No. Rangka: MH3SG3120HK327351 dan No. Mesin: G3E4E0461214 atas nama Kemendesa PDTT-DITJEN PDTu alamat Jl. Abdul Muis No.7 Gambir Jakarta Pusat merupakan kesalahan Saudara Arwin (Tenaga Penunjang Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana sebagai pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri-PPNPN) dan yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian negara sesuai dengan SKTJM yang dibuat sebesar Rp24.900.000,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Direktorat Jenderal PKP2Trans

1. Hasil yang sudah di tindak lanjuti pemeriksaan BPK Tahun 2017 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pusat (PKP2Trans) Nomor LHP 80C/HP/XVI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018:
2. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja yang dibayarkan ganda kepada pegawai/pejabat a.n Conrad Hendrarto sebesar Rp.7.529.000,- sudah selesai di tindak lanjuti (bukti setor terlampir).
 3. Realisasi belanja lembur pada Ditjen PKP2Trans berindikasi tidak riil sebesar Rp.2.229.482.500,- sudah di tindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.200.000.000,- (bukti setor terlampir).
 4. Realisasi belanja perjalanan dinas pada Ditjen PKP2Trans dilakukan oleh pegawai yang melakukan rekam kedatangan dan kepulangan secara elektronik pada hari perjalanan dinas sebesar Rp1.617.317.762,- sudah di tindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp101.512.901,- (bukti setor terlampir).
 5. Pusat PKP2Trans (Dit.P3KT, Dit.Petatrans, Dit.PPT dan Setditjen) realisasi belanja barang dan jasa berindikasi tidak riil sebesar Rp.669.485.115,- sudah di tindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.107.457.255,- (bukti setor terlampir).
- b) Daerah Nomor LHP 80C/HP/XVI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018:
6. Kekurangan volume atas 3 paket pekerjaan sebesar Rp.93.520.666,- pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kab. Belu yaitu:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di UPT Sanabibi sebesar Rp.60.925.508,- sudah selesai di tindak lanjuti (bukti setor terlampir).
 - b. Pembangunan Kantor Unit di UPT Sanabibi sebesar Rp.15.671.102,- sudah selesai di tindak lanjuti sebesar Rp.15.671.056,- (bukti setor terlampir).

- c. Pembangunan Embung di UPT Sanabibi sebesar Rp.16.924.056,- sudah di tindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.3.650.000,- (bukti setor terlampir).
- 7. Kekurangan volume 2 paket pada pekerjaan peningkatan jalan, pembukaan Jalan Rumbu Matawai Maringu SAB di Desa Yubuwai Kab. Sumba Timur sebesar Rp.237.167.417,- yaitu:
 - a. Pekerjaan peningkatan jalan, pembukaan jalan rumbu matawai maringu dan pembangunan jembatan desa yubuwai sebesar Rp.142.946.468,- sudah selesai di tindak lanjuti sebesar Rp.142.946.468,- (bukti setor terlampir).
 - b. Pekerjaan pembangunan sarana air bersih di desa yubuwai sebesar Rp.94.220.949,- sudah selesai di tindak lanjuti sebesar Rp.94.220.949,- (bukti setor terlampir).
- 8. Kekurangan volume atas 6 paket pekerjaan pembangunan permukiman transmigrasi terdiri pemasangan jaringan pipa, pembangunan tugu air, bak reservoir, bak pengumpul, pembangunan KUPT dan jembatan/gorong-gorong di UPT Kab. Nagekeo sebesar Rp.314.073.351,- yaitu:
 - c. Pekerjaan pembangunan permukiman transmigrasi di UPT Nagekeo sebesar Rp.200.810.021,- dengan pelaksana CV.Rimba Mas Indah sudah di tindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.131.000.000,- (bukti setor terlampir).
 - d. Pemasangan jaringan pipa dan pembangunan tugu air di UPT Nagekeo sebesar Rp.56.797.508,- dengan pelaksana CV. Hikmah sudah di tindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.15.200.000,- (bukti setor terlampir).
 - e. Pembangunan bak reservoir dan bak pengumpul di UPT Nagekeo sebesar Rp.30.211.536,- dengan

- pelaksana CV. Hikmah sudah di tindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.20.200.000,- (bukti setor terlampir).
- f. Pembangunan rumah kepala UPT di Nagekeo sebesar Rp.10.149.209,- sudah selesai di tindak lanjuti (bukti setor terlampir).
 - g. Pembangunan jembatan/gorong-gorong di UPT Nagekeo sebesar Rp.16.105.077,- sudah selesai di tindak lanjuti (bukti setor terlampir).
9. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan RTJK sebesar Rp.228.285.318,- pada pekerjaan sanitasi, cor lantai beton dan lain-lain (OPD) dana tugas pembantuan Disnakertrans Kab. Sintang yaitu:
- a. Kekurangan volume pekerjaan sanitasi dan lain-lain sebesar Rp200.608.090,- sudah selesai ditindak lanjuti sebesar Rp200.608.090,- (bukti setor terlampir).
 - b. Pekerjaan cor lantai beton untuk 4 unit RTJK sebesar Rp27.677.228,- sudah selesai ditindak lanjuti sebesar 27.677.228 (bukti setor terlampir).
10. Kekurangan volume 2 paket pekerjaan pembangunan sebesar Rp.353.117.655,- pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kab. Sanggau yaitu:
- a. Pekerjaan jalan poros sebesar Rp.129.555.155,- sudah selesai ditindak lanjuti (bukti setor terlampir).
 - b. Pekerjaan Pembangunan RTJK Rype 36 sebesar Rp.223.562.500,- pelaksana PT. Dwi Rama Mandiri sudah ditindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.87.500.000,- (bukti setor terlampir).
11. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.13.860.348,- dan potensi belum dipungutnya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.386.536.100,- atas 4 paket pekerjaan pada Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Pembangunan FU, RTJK, Sumur Gali, dan Pembukaan Lahan Desa Dana Tugas Pembantuan Dinkopnakertrans Kab. Bengkayang yaitu:

- a. Pembangunan RTJK sebesar Rp.338.350.000,- pelaksana PT.SUMISMU sudah ditindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.47.000.000,- (bukti setor terlampir).
- b. Pembukaan Lahan Desa sebesar Rp.30.563.500,- Pelaksana CV. Puncak Vandering sudah ditindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.5.500.000,- (bukti setor terlampir).
- c. Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp.17.622.600,- sudah selesai di tindak lanjuti (bukti setor terlampir).

12. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dari satu paket pekerjaan sebesar Rp.998.858.899,- pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kab. Lahat:

- a. Pekerjaan Pembangunan RTJK tipe 36 sebanyak 50 sebesar Rp.700.227.437,- PT. Sukses Sari Kintaro sudah selesai ditindak lanjuti sebesar Rp.700.227.437,- (bukti setor terlampir).
- b. Pembangunan RTJK Type 36 sebanyak 25 unit sebesar Rp.298.631.462,- sudah selesai ditindak lanjuti sebesar Rp.298.631.462,- (bukti setor terlampir).

13. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dari 4 paket pekerjaan sebesar Rp.1.109.501.439,- dan denda keterlambatan atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.51.417.276,- Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kab. Banyuasin:

- a. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan permukiman transmigrasi UPT Sri Agung sebesar

- Rp.181.474.072,- dan denda keterlambatan sebesar Rp.40.287.500,- dengan pelaksana PT. Graha Indo Artha sudah ditindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.31.474.072,- (bukti setor terlampir).
- b. Kekurangan volume pekerjaan pengadaan galian batas UPT Sri Agung sebesar Rp.532.346.580,- dengan pelaksana CV. Bunga Tanjung sudah ditindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.181.550.000,- (bukti setor terlampir).
 - c. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan water treatment mini di UPT Maju Ria sebesar Rp.56.793.662,- dan denda keterlambatan sebesar Rp.11.129.776,- dengan pelaksana CV.Lyquitha Persada sudah ditindak lanjuti secara bertahap sebesar Rp.11.129.776,- (bukti setor terlampir).
2. Dalam laporan operasional ada beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp.12.667.455,- terdapat 2 satker yaitu:
- a) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan kode satker 350467 sebesar Rp.4.195.455,- dengan akun 425791 merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara, dilakukan penyesuaian TGR atas penyelesaian pelunasan atas kehilangan motor dengan melakukan jurnal umum (bukti setor terlampir).
 - b) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan kode satker 350169 sebesar Rp.8.472.000,- dengan akun 425793 merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga, dilakukan penyesuaian atas Penyelesaian atas Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang seharusnya pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal TAYL dengan melakukan jurnal umum (bukti setor terlampir).

Direktorat Jenderal PKTrans**• Hibah**

Hibah sesuai PMK 111/PMK.06/2016 dari Ditjen PKTrans yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- Usulan Hibah sebanyak 476 usulan senilai Rp2.134.402.420.080,00
- Persetujuan Hibah yang sudah disetujui sebanyak 216 Usulan senilai Rp861.487.897.596,00
- Risalah Hibah sebanyak 198 Usulan senilai Rp746.552.075.021,00

• Perbaikan Data E-Rekon sesuai dengan Petunjuk BPK

Penjelasan atas selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp97.881.629,00 pada E-Rekon dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Transfer Keluar, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi mencatat sebesar Rp92.558.880,00.

Transfer Masuk, Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebesar Rp82.202.208,00.

Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp10.356.672,00 disebabkan oleh kurang pencatatan beras dalam Aplikasi Persediaan di satker Penerima. Telah dilakukan perbaikan pencatatan di Aplikasi Persediaan sesuai dengan petunjuk BPK dan dilakukan upload ke E-Rekon.

- Transfer Keluar, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi mencatat sebesar Rp97.900.008,00.

Transfer Masuk, Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebesar Rp97.887.379,00.

Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp 12.629,00 disebabkan karena perbedaan pencatatan pembulatan pada harga satuan beras di Aplikasi

Persediaan Satker Pengeluaran maupun Satker Penerima. Telah dilakukan perbaikan pencatatan di Aplikasi Persediaan sesuai dengan petunjuk BPK. Telah dilakukan perbaikan pencatatan di Aplikasi Persediaan sesuai dengan petunjuk BPK dan dilakukan upload ke E-Rekon.

- Transfer Keluar, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi mencatat sebesar Rp14.643.528,00.

Transfer Masuk sudah tercatat di satker penerima yaitu Provinsi Sulawesi Tengah.

Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp14.643.528,00 disebabkan karena kesalahan pencatatan kode organisasi penerima Satker in aktif (Disnakertrans Kab. Parigi Moutong) di aplikasi satker Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi seharusnya kode organisasi penerima adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Telah dilakukan perbaikan pencatatan di Aplikasi Persediaan sesuai dengan petunjuk BPK dan dilakukan upload ke E-Rekon

- Transfer Keluar, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi mencatat sebesar Rp26.356.800,00.

Transfer Masuk seharusnya dicatat oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur.

Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp26.356.800,00 disebabkan karena Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur belum melakukan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan. Telah dilakukan perbaikan pencatatan di Aplikasi Persediaan sesuai dengan petunjuk BPK dan dilakukan upload E-Rekon.

- Transfer Keluar, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi mencatat sebesar Rp46.512.000,00

Transfer Masuk seharusnya dicatat oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara.

Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp46.512.000,00 disebabkan karena Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara belum melakukan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan. Telah dilakukan perbaikan pencatatan di Aplikasi Persediaan sesuai dengan petunjuk BPK dan dilakukan upload ke E-Rekon.

BPK telah merekomendasikan kepada Ditjen PKTrans untuk memperbaiki pencatatan beras di Akun 117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga ke Akun 117128. Satker-satker yang melakukan perbaikan pencatatan beras adalah Satker Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Ditjen PKTrans. Satker-satker tersebut telah melakukan upload ke E-Rekon.

Sekretariat Jenderal

- 1) Bendahara Pengeluaran satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, berdasarkan Surat Persetujuan Kepala KPPN Jakarta VI Nomor: S—2348/WPB.12/KP.175/2015 memiliki satu rekening dengan Nama Rekening: BPg175.Sekjen Kementerian Desa PDTT, dengan Nomor Rekening: **38747563-3** yang dibuka di Bank BNI Kantor Cabang Harmoni dengan tanggal pembukaan Rekening 19 Juni 2015. Rekening tersebut sampai dengan saat ini masih dipergunakan sebagai Rekening Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (350088) untuk kepentingan transaksi-transaksi LS bendahara, UP dan TUP;
2. Tanggal 28 Mei 2018 terdapat Revisi pertama anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi, sehingga mengakibatkan penambahan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar Rp 87.364.661.000,- yang bersumber dari pelimpahan sebagian dana *Loan* dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar Rp 11.074.370.444,-. Rincian terlampir.
4. Pengembalian UP/ TUP sebesar Rp 143.900,00- (Seratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) adalah Pengembalian sisa UP Biro Umum TA 2018 melalui SSPB tanggal 31 Desember 2018 dengan NTPN 4D6822CSV7G2SCVI;
5. Pengembalian UP/ TUP sebesar Rp 75.091.149,00- (Tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu Seratus empat puluh sembilan) adalah Pengembalian sisa TUP Setjen KDPDTT TA 2018 melalui SSPB tanggal 28 Desember 2018 dengan NTPN 31B0F0KKN3J4URM9;
6. Pengembalian UP/ TUP sebesar Rp 2.738.296,00- (Dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) adalah Pengembalian sisa UP Biro Perencanaan TA 2018 melalui SSPB tanggal 27 Desember 2018 dengan NTPN AA684705SUIGGLTP;
7. Pengembalian UP/ TUP sebesar Rp 310.498,00- (Tiga ratus Sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) adalah Pengembalian Sisa UP TA 2018 melalui SSPB tanggal 27 Desember 2018 dengan NTPN CF61C6SCSM3GN4TI;

Balilatfo

1. Pada TA 2018 terdapat penyederhanaan satker dari 4 (empat) satker pusat di lingkungan Balilatfo yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan (350476), Pusat Pelatihan Masyarakat (350478), Pusat Data dan Informasi (350479) dan Sekretariat Balilatfo (350488) yang telah dilikuidasi dan bergabung menjadi 1 DIPA serta kode satker baru yaitu

satker Balilatfo (350475). Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Lampiran 1 huruf C angka 1 tentang Penyederhanaan Satker. Penutupan satker tersebut dilakukan per tanggal 31 Oktober 2018.

2. Berdasarkan Permendesa No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, Balilatfo mendapat tambahan 2 (dua) satker pada tahun 2018 yaitu Balai Latihan Masyarakat Ambon (215155) dan Balai Latihan Masyarakat Jayapura (255164). Tugas dari 2 (dua) satker ini membantu pelayanan pelatihan masyarakat di Kawasan Indonesia Timur dimana semula hanya dikelola oleh Balai Pelatihan Masyarakat Makassar.
3. Balai Latihan Masyarakat Ambon mendapat hibah gedung dari Pemda Ambon pada tahun 2017. Namun berkas-berkas hibah baru diserahkan ke Balai Latihan Masyarakat Ambon pada tahun 2018 sehingga penginputan belanja modal gedung dan bangunan untuk keperluan renovasi kantor balai ke aplikasi simak bmn baru dilakukan pada tahun 2018. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi No. 410-195 Tahun 2017, tanggal 12 Desember 2017 Balai Latihan Masyarakat Ambon telah menerima hibah berupa tanah seluas 25.000 M2 beserta bangunan di atasnya seluas 1.397 M2 dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Gedung kantor permanen
 - b. RTT Gol. III Per Kelas III
 - c. RTT Gol. III Per Kelas III
 - d. RTT Gol. III Per Kelas III

- e. RTT Gol. III Per Kelas III
 - f. RTT Gol. III Per Kelas III
 - g. RTT Gol. III Per Kelas III
 - h. RTT Gol. III Per Kelas III
 - i. RTT Gol. III Per Kelas III
 - j. Mushala dalam keadaan rusak berat
4. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi mendapatkan dana pinjaman loan IBRD 8217-ID tentang Program Inovasi Desa, dimana PIU (*Project Implementing Unit*) adalah PUSDATIN dan sumber dana dari *World Bank*. Balilatfo menerima dana pinjaman tersebut sebesar Rp26.875.345.000. Pusdatin ditugaskan untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa melalui:
- a. Pembangunan Sistem Informasi Pusat Data Desa Indonesia (PDDI)
 - b. Pengembangan Aplikasi Ruang Desa
 - c. Penyusunan Data dan Informasi tentang Manfaat Dana Desa di 33 Provinsi dan Pelaksanaan Perencanaan, Pemantauan dan Supervisi Pelaksanaan Penyusunan Data dan Informasi tentang Manfaat Dana Desa.
 - d. Visualisasi Data
5. Pada Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta untuk akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp268.000 karena pada tahun 2016 terdapat akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi yaitu kursi kayu sebanyak 4 unit dan sudah diusulkan untuk dihapuskan di tahun 2017. Aset tersebut termasuk kategori ekstrakomptabel dan neraca SAIBA tidak bisa terbaca. Untuk menghilangkan selisih itu, telah dilakukan penjurnalan pada tahun 2016 dan saat itu selisih telah hilang. Sehubungan dengan kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2018 dimana data simak BMN ikut terupload ke e-rekon, selisih tahun 2016 muncul kembali. Selisih tersebut telah diperbaiki dengan mengupload ulang backup yang telah diperbaiki oleh Dirjen Perbendaharaan

sehingga selisih sebesar Rp268.000 telah hilang.

6. Sesuai dengan rekomendasi dari BPK, selisih pada Balai Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Denpasar sebesar Rp750.000 harus dihilangkan pada Laporan Keuangan Tahunan 2018. Selisih tersebut berasal dari jurnal pada tahun 2015 yang menggunakan akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah BLU. Sementara Balai Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Denpasar merupakan satker non BLU. Satker telah melakukan perbaikan dan upload ulang namun masih muncul jurnal lama. Setelah ditelusuri ternyata selisih tersebut karena satker menggunakan backup yang salah saat upload ke aplikasi E-Rekon dan timbul selisih Rp750.000. satker sudah memperbaiki selisih tersebut dengan mengupload ulang backup yang benar sehingga selisih hilang.
7. Pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN terdapat piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi sebesar Rp19.541.286. Piutang ini timbul akibat hilangnya sepeda motor
 - a. Nomor polisi B 3115 SQC dan telah dilaporkan ke kepolisian dengan nomor lapor 41/K/I/2018/PMJ/JAKTIM/SEK.PR serta telah dilaporkan ke pihak Itjen atas kehilangan tersebut atas nama Roida Silalahi atas kehilangan tersebut untuk dihitung TGR nya dengan nomor : B.161/Balilatfo.3/I/2018. Sepeda motor yang hilang tersebut sudah dipindahkan ke aset yang dihentikan penggunaannya. Untuk pembayaran TGR atas nama Roida Silalahi telah dilakukan sebanyak satu kali pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp500.000.
 - b. Nomor polisi B 3403 SQC dinyatakan hilang dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan nomor lapor 1728/K/X/2016/Sek. Duren Sawit (terlampir). Pihak Itjen telah menerbitkan surat SPTJM beserta TGR

sepeda motor tersebut atas nama Anisya Kusumawati dengan nomor: B. 357/Balilatfo.3/IV/2017 dan sesuai rekomendasi dari BPK sepeda motor tersebut telah dimasukkan ke dalam aset lainnya. untuk pembayaran TGR atas nama Anisya Kusumawati telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu:

- Pada tanggal 14 September 2018 sebesar Rp500.000
- Pada tanggal 19 September 2018 sebesar Rp500.000
- Pada tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.

8. Terdapat Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) yang masih tercatat dalam SIMAK BMN pada Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, sudah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. dengan mengajukan permohonan penyerahan Aset Tetap dalam Renovasi ke pada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I. melalui surat nomor: 686/SJ-KDPDTT/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 pada tanggal pelaporan masih dalam proses penyelesaian.
9. Nilai validasi buku minus pada satker Balilatfo sebanyak 254 NUP yang disebabkan ketidaksempurnaan pengiriman akumulasi penyusutan pada aplikasi SIMAK BMN.
10. Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin memiliki Mesin Jahit dan Obras yang sudah tidak digunakan dikarenakan Mesin Jahit tersebut tidak ada pelatihan jahit menjahit, secara fisik Barang masih dapat digunakan atau dalam kondisi baik, dan secara

kebutuhan pelatihan tidak dapat digunakan karena sudah tidak tersedianya modul/bimtek untuk masyarakat desa tentang menjahit, keterbatasan anggaran dalam hal maintenance/perawatan barang, mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang mesin jahit, sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Usulan hibah sedang menunggu rekomendasi dari Inspektorat Jenderal.

11. Pada tahun 2018, BPK melakukan audit terhadap penilaian kembali BMN yang dilakukan oleh tim penilai dari KPKNL pada Balai-Balai yang terdapat di lingkungan Balilatfo. Berdasarkan hasil audit BPK, terdapat nota kesepakatan final antara BPK, Kemenkeu dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdapat beberapa permasalahan pada balai-balai di lingkungan Balilatfo yaitu ketidaksesuaian form pendataan dengan SIMAN, dokumen penilaian laporan kembali yang kurang lengkap, selisih nilai wajar SIMAN dengan LPK, selisih nilai wajar SIMAN dengan pengujian serta aset yang belum di revaluasi. Balilatfo telah menindaklanjuti atas hasil audit BPK berupa membuat form pendataan baru, perbaikan form pendataan sesuai audit BPK, membuat SPTJM dan Surat Keterangan terkait hasil audit revaluasi dan perbaikan data pada SIMAK BMN.
12. Pada Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi, telah diselesaikan permasalahan berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh pihak ketiga yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu tanpa disertai kelengkapan dokumen penggunaan yang jelas seluas

22 Ha yang diatasnya terdapat pula 2 (dua) unit Rumah Negara Golongan II Type 36 dan 1 (satu) unit Rumah Negara Type II Barak Pekerja. Bukti Berita Acara Serah antara Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu sesuai dengan Bukti Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor 028/2039/3/2018 dan BA-122/BPPTP-BKL/IV/2018 tanggal 25 April 2018. Tanah dan Bangunan tersebut telah ditetapkan Status Penggunaannya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 08/KM.6/WKN.05/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Tanah milik BBPLM yang berlokasi di jalan empang tiga, dengan nilai diatas seratus juta sudah diajukan ke KPKNL Jakarta II dengan nomor surat : B.454/BBPLM.I/IV/2017 tanggal 13 April 2017. Namun ditolak dikarenakan dokumen belum lengkap dan akan diusulkan ulang oleh Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta sesuai dengan arahan DJKN.